

Katalog : 3101023.64

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN INDIKATOR PENTING
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN I 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN INDIKATOR PENTING
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TRIWULAN I 2019



Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I 2019

ISBN : 978-602-6263-90-2

No. Publikasi : 64560.1907

Katalog : 3101023.64

Ukuran Buku : 21,0 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 78 halaman

Naskah:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Penyunting :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar Kover oleh :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Dicetak oleh:

CV. Mahendra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Naskah	:	BPS – Provinsi Kalimantan Timur
Pengarah	:	Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si
Penanggung Jawab	:	Ir. Gunadi Irianto
Penyunting	:	Titik Hidayati, SST., M.S.E
Penulis	:	Loveandre Danang H., SST
Gambar Kulit	:	Loveandre Danang H., SST
Layout	:	Loveandre Danang H., SST

<https://kaltim.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas terbitnya Publikasi "**Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I 2019**". Publikasi ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur. Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi.

Penyajian dilakukan secara triwulanan yang informasinya diperoleh secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan seperti: inflasi, ekspor/impor, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, angka ramalan produksi dan lain sebagainya. Disamping itu juga dilengkapi dengan berbagai informasi penting lainnya yang datanya diperoleh dari berbagai pihak. Indikator-indikator yang disajikan dalam publikasi ini sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten seperti Kepala Daerah dan Jajarannya, Legislatif, dan akademisi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terbitnya publikasi ini kami menyampaikan terima kasih.

Samarinda, Februari 2019

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur



Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENJELASAN UMUM/BATASAN.....	1
1.1. DEMOGRAFIS.....	1
1.2. INFLASI DAN INDEKS HARGA KONSUMEN.....	1
1.3. PERDAGANGAN LUAR NEGERI.....	2
1.4. NILAI TUKAR PETANI.....	2
1.5. WISATAWAN MANCANEGARA.....	3
1.6. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK).....	5
1.7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)/PDB.....	5
1.8. INDUSTRI PENGOLAHAN.....	9
1.9. KETENAGAKERJAAN	12
1.10. KEMISKINAN	13
1.11. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	15
II. PENDAHULUAN.....	18
III. URAIAN RINGKAS	20
3.1. KONDISI DEMOGRAFIS.....	20
3.2. PERKEMBANGAN INDEK HARGA KONSUMEN/INFLASI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I 2019.....	23
3.3. PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I 2019.....	29
3.4. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) KALIMANTAN TIMUR*) MENURUT SUBSEKTOR TRIWULAN I 2019	35
3.5. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BERBINTANG BULAN TRIWULAN I 2019	43
3.6. INDEKS TENDENSI KONSUMEN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I 2019.....	48
3.7. PERTUMBUHAN EKONOMI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I-2019.....	53
3.8. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI PENGOLAHAN TRIWULAN I 2019.....	59
3.9. KEADAAN KETENAGAKERJAAN KALIMANTAN TIMUR AGUSTUS 2018	62
3.10. TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN TIMUR SEPTEMBER 2018	64
3.11. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2018	67

<https://kaltim.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, 2014 - 2018	20
Gambar 3.1.2 Jumlah Desa Menurut Kategori IPD Provinsi Kalimantan Timur, 2014 - 2018	21
Gambar 3.1.3 Perkembangan IPD Menurut Dimensi Penyusun IPD Provinsi Kalimantan Timur, 2014 dan 2018	21
Gambar 3.2.1 Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Januari 2018 – Januari 2019.....	25
Gambar 3.2.2 Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Februari 2018 – Februari 2019.....	26
Gambar 3.2.3 Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Maret 2018 – Maret 2019	27
Gambar 3.3.1 Perkembangan Ekspor Kalimantan Timur Januari 2018 – Maret 2019	29
Gambar 3.3.2 Perkembangan Impor Kalimantan Timur Januari 2018 - Maret 2019	32
Gambar 3.4.1 NTP Provinsi Kalimantan Timur *) Maret 2018 - Maret 2019	36
Gambar 3.4.2 NTP Per Subsektor Provinsi Kalimantan Timur *) Januari 2018 - Januari 2019	41
Gambar 3.5.1 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Kalimantan Timur Maret 2018 – Maret 2019 (dalam persen)	43
Gambar 3.5.2 Rata-rata (hari) Tamu Menginap Pada Hotel Berbintang di Provinsi Kalimantan Timur Maret 2018-Maret 2019	45
Gambar 3.5.3 Rata-rata (hari) Tamu Menginap Pada Hotel Berbintang di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Asal Tamu, Maret 2018-Maret 2019	45
Gambar 3.5.4 Distribusi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kebangsaan Januari 2019.....	46
Gambar 3.5.5 Distribusi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kebangsaan Februari 2019.....	46
Gambar 3.5.6 Distribusi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kebangsaan Maret 2019	47
Gambar 3.5.7 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur Januari 2018-Maret 2019	47
Gambar 3.6.1 Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2015 - Triwulan I-2019	50
Gambar 3.6.2 Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2019 Menurut Provinsi di Kalimantan.....	51
Gambar 3.6.3 Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II-2019 Menurut Provinsi di Kalimantan.....	52
Gambar 3.7.1. Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha PDRB Kalimantan Timur Triwulan I-2019 (y-on-y) (Persen)	53

Gambar 3.7.2 Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen).....	54
Gambar 3.7.3 Perkembangan Tiga Lapangan Usaha dengan Laju Pertumbuhan Tertinggi pada Triwulan I-2019 (q-to-q) (Persen).....	55
Gambar 3.7.4 Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran Triwulan I-2019 (y-on-y) (Persen).....	55
Gambar 3.7.5 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (y-on-y) (Persen)	56
Gambar 3.7.6 Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran (q-to-q) Triwulan I-2017 - Triwulan I-2019	57
Gambar 3.7.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan Triwulan I-2019 secara q-to-q dan y-on y (Persen)	57
Gambar 3.7.8 Struktur Ekonomi Pulau Kalimantan Triwulan I-2019	58
Gambar 3.8.1 Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang Triwulan I-2019 (y-on-y) 59	
Gambar 3.8.2 Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang Triwulan I-2019 (q-to-q) 60	
Gambar 3.8.3 Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Mikro dan Kecil Provinsi Kalimantan Timur, Triwulan I/2019	61
Gambar 3.11.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur, 2010-2018.....	68
Gambar 3.11.2 Perkembangan Komponen Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kalimantan Timur, 2010-2018.....	69
Gambar 3.11.3 Perkembangan Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Kalimantan Timur, 2010-2018.....	70
Gambar 3.11.4 Perkembangan Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kalimantan Timur, 2010-2018.....	70
Gambar 3.11.5 Perkembangan Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kalimantan Timur, 2010-2018.....	71
Gambar 3.11.6 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2018	72

DAFTAR LAMPIRAN

<https://kaltim.bps.go.id>

<https://kaltim.bps.go.id>

I. PENJELASAN UMUM/BATASAN

1.1. DEMOGRAFIS

Penduduk :

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Sensus Penduduk :

Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel.

Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Indeks Pembangunan Desa ini hanya dihitung pada wilayah administrasi setingkat desa yang berstatus pemerintahan “desa”. Indeks Pembangunan Desa menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori mandiri, berkembang, dan tertinggal.

Sumber Data :

- Data jumlah penduduk diperoleh dari proyeksi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Hasil Sensus Penduduk.
- Data luas wilayah berdasarkan Peraturan Daerah No.01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.
- Data IPD diperoleh dari survei Potesi Desa 2018.

1.2. INFLASI DAN INDEKS HARGA KONSUMEN

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indeks Harga konsumen (IHK), Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

1.3. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Terdiri dari **ekspor** dan **impor** barang-barang.

Cakupan komoditas : Semua jenis barang termasuk kecuali yang termasuk dibawah ini:

1. Pakaian dan perhiasan dari para penumpang dan awak alat angkut.
2. Barang-barang yang diekspor / diimpor dari suatu negara untuk digunakan untuk keperluan kedutaan besar negara tersebut.
3. Barang-barang yang digunakan untuk keperluan ekshebis atau pameran.
4. Peti Kemas yang dimaksudkan untuk diisi kembali.
5. Uang, surat-surat berharga dan barang finansial lainnya.
6. Barang-barang contoh.

Sistem Perdagangan

1. Statistik ekspor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum yang meliputi seluruh area geografi Indonesia.
2. Statistik Impor berdasarkan pada Sistem Perdagangan Umum sejak tahun 2008. Sebelum tahun 2008 menggunakan Sistem Perdagangan Khusus yang meliputi seluruh area geografi Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai Luar Negeri.

Penilaian

1. Ekspor mengacu pada nilai Free On Board (FOB).
2. Impor mengacu pada nilai Cost Insurance and Freight (CIF).
3. Keduanya dinyatakan dalam Dollar Amerika (USD)

Pengukuran Kuantitas :

Semua kuantitas dinyatakan dalam bentuk berat netto dalam satuan kilogram.

Rekan Negara

Negara tujuan adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim. **Negara asal** adalah negara dimana barang-barang tersebut diproduksi, setelah diverifikasi oleh Kantor Bea Cukai, sesuai dengan peraturan.

1.4. NILAI TUKAR PETANI

PENGERTIAN UMUM :

- NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani
- NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)

Arti Angka NTP :

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Kegunaan dan Manfaat

- Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Cakupan Komoditas

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
- Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah
- Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

1.5. WISATAWAN MANCANEGERA

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara, yaitu

1. Wisatawan (tourist)

Adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain:

- a. Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain.
- b. Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain.

2. Pelancong (Excursionist)

adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut).

Konsep dan Definisi Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia

1. Usaha Akomodasi

adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran.

2. Hotel berbintang

adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

3. Hotel nonbintang

adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang tetapi telah memenuhi kriteria sebagai hotel nonbintang.

4. Penginapan Remaja

adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/pengalaman.

5. Pondok wisata

adalah usaha jasa pelayanan penginapan bagi umum yang dilakukan perorangan dengan menggunakan sebagian atau seluruh dari tempat tinggalnya (dengan pembayaran harian).

6. Perkemahan

adalah usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat penginapan, termasuk juga caravan.

7. Akomodasi lainnya

adalah usaha penyediaan tempat penginapan yang tidak termasuk kriteria di atas seperti wisma, losmen, dll.

8. Rata-rata Tenaga Kerja Per Usaha

adalah hasil bagi jumlah tenaga kerja pada usaha akomodasi (sesuai dengan klasifikasi) dengan jumlah usaha akomodasi (yang termasuk ke dalam klasifikasi/kelompok tersebut).

9. Rata-rata Tenaga Kerja Per Kamar

adalah hasil bagi jumlah tenaga kerja pada usaha akomodasi dengan jumlah kamar usaha akomodasi (sesuai dengan klasifikasi)

10. Rata-rata Tamu Per Hari

adalah rata-rata tamu yang datang dan menginap di hotel akomodasi per harinya, dihitung berdasarkan tamu yang datang dan menginap selama tahun tersebut.

1.6. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

Informasi dini mengenai perekonomian juga dapat dianalisis melalui Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang diperoleh melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum yang dapat digambarkan dari kondisi ekonomi para konsumen sebagai pelaku konsumsi terhadap produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Informasi yang dikumpulkan meliputi pendapatan rumah tangga, pengaruh inflasi, dan konsumsi komoditi-komoditi makanan (ikan, daging, telur, susu, buah-buahan, dan lain-lain) serta bukan makanan (pakaian, biaya perumahan, biaya pendidikan, transportasi, biaya kesehatan, rekreasi, dan lain-lain). Disamping itu dikumpulkan pula informasi mengenai rencana membeli barang-barang tahan lama (rumah/tanah, mobil, TV, komputer, dan lain-lain). ITK juga terdiri dari dua jenis indeks yaitu Indeks Indikator Kini (Current Indicator Index) dan Indeks Indikator Mendatang (Future Indicator Index). Indeks Indikator Kini merupakan indeks komposit dari beberapa variabel yang dapat mengidentifikasi kondisi ekonomi rumah tangga (konsumen) pada saat triwulan berjalan (saat survei) dibandingkan periode triwulan sebelumnya. Sedangkan Indeks Indikator Mendatang merupakan indeks komposit dari beberapa variabel yang dapat mengidentifikasi prediksi kondisi ekonomi rumah tangga (konsumen) pada periode tiga bulan mendatang. ITK Indeks Indikator Kini dan Indeks Indikator Mendatang disampaikan secara rutin kepada publik bersamaan dengan press release PDB triwulanan dalam bentuk Berita Resmi Statistik (BRS).

1.7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)/PDB

Pendapatan Nasional, Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Kegunaan Statistik Pendapatan Nasional

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah

1. PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara.
3. PDB harga konstan (*riil*) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
5. PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
6. Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
7. PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
8. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk.
9. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Output, output perusahaan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu meliputi produksi utama, produksi ikutan maupun produksi sampingan. Output tersebut merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

Biaya Antara, Biaya antara terdiri dari barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi. Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban untuk penyelesaian pekerjaan, diperlakukan sebagai biaya antara.

Nilai Tambah, Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan atas nilai barang dan jasa sebagai biaya antara agar menjadi output.

Pajak Tidak Langsung Neto dan Penyusutan, Pajak tidak langsung neto mencakup pajak tidak langsung yang diterima pemerintah pusat atau pemerintah daerah dikurangi dengan subsidi bahan bakar minyak dan pupuk.

Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku (*at current market prices*) atau **nominal**, PDB yang dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun-tahun bersangkutan.

Produk Domestik Bruto harga konstan (*riil*), merupakan PDB atas dasar harga berlaku, namun tingkat perubahan harganya telah “dikeluarkan”. Peningkatan besarnya nilai PDB ini dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor .

Distribusi Produk Domestik Bruto harga berlaku, menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara.

Distribusi Produk Domestik Bruto menurut penggunaan, menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.

Produk Domestik Bruto penggunaan atas dasar harga konstan, bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri.

Produk Domestik Bruto per kapita atas dasar harga konstan, berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Konsep Dan Definisi Pdb Pengeluaran :

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind-purchased market production).

3. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

4. Inventori

Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain. Merupakan persediaan yang berasal dari pihak lain, yang akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

5. Ekspor - Impor

Secara umum, konsep ekspor-impor luar negeri yang digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB Penggunaan mengacu pada System of National Accounts (SNA) 1993. Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB Penggunaan Provinsi merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (non-resident) terhadap residen suatu wilayah Provinsi.

ICOR(*Incremental Capital Output Ratio*), menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output/pendapatan (ΔY) yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal (ΔK). ICOR merupakan sebuah koefisien yang digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan investasi guna menghasilkan penambahan output sebanyak 1 unit. Selain itu juga dapat dilihat terjadinya inefisiensi dalam investasi, yaitu bila koefisien ICOR bernilai negatif atau nilai relatif besar. Kondisi investasi yang efisien akan terjadi pada koefisien ICOR yang nilainya relatif kecil.

Indeks Ketimpangan Williamson, merupakan perhitungan disparitas dilakukan dengan pendekatan wilayah dan rumah tangga. Dalam pendekatan wilayah sumber data yang digunakan adalah PDRB perkapita. Dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Williamson yaitu Indeks Disparitas Williamson dapat menggambarkan kesenjangan antar wilayah.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemda Provinsi, adalah Realisasi / Perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Asli Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah.

Pajak Daerah, Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Retribusi Daerah, yaitu Pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek, parkir dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Hasil Daerah yang Sah, yaitu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

DAU atau *general purpose grant* atau *block grants* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besarnya DAU, sesuai pasal 7 Undang-Undang No 25 tahun 1999 (berlaku sampai APBN tahun anggaran 2007) sekurang-kurangnya 25 persen penerimaan dalam negeri dan menurut pasal 27 UU No 33 tahun 2004 sekurang-kurangnya 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto berlaku mulai tahun anggaran 2008.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Mengacu Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 bahwa tujuan DAU terutama adalah untuk: (a) *horizontal equity* dan (b) *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum.

1.8. INDUSTRI PENGOLAHAN

Konsep dan Definisi :

- **Industri Pengolahan** adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).
- **Jasa industri** adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.
- **Perusahaan** atau **usaha industri** adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu :

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih)

2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang)
3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang)
4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang)

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4*, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009.

Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar.

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.

Pekerja Produksi adalah pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

Pekerja lainnya adalah pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan, seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

Nilai Tambah

Nilai tambah adalah besarnya output dikurangi besarnya nilai input (biaya antara).

Metode Penghitungan: $NTB = Output - Input$

Produktifitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi.

Metode Penghitungan:

Produktifitas TK = $Output / Jumlah\ tenaga\ kerja\ yang\ dibayar$.

Komposisi Biaya Input

Input atau biaya antara adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari biaya:

- **Bahan Baku** : Bahan baku adalah semua jenis bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi dan tidak termasuk: pembungkus, pengepak, pengikat barang jadi, bahan bakar yang dipakai habis, perabot/ peralatan.

- Bahan bakar, tenaga listrik dan gas : Bahan bakar yang digunakan selama proses produksi yang berupa: bensin, solar, minyak tanah, batubara dan lainnya.
- Sewa gedung, mesin dan alat-alat
- Jasa non industry : Jasa yang tidak berkaitan dengan proses produksi

Komposisi biaya input adalah persentase dari masing-masing komponen biaya input terhadap biaya input.

Komposisi Nilai Output

Output adalah nilai keluaran yang dihasilkan dari proses kegiatan industri yang terdiri dari:

- Barang yang dihasilkan : barang –barang yang dihasilkan dari proses produksi
- Tenaga listrik yang dijual : Tenaga listrik yang dibangkitkan sendiri oleh perusahaan dan sebagiannya dijual kepada pihak lain.
- Jasa industri yang diterima dari pihak lain : Adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon).
- Selisih nilai stok barang setengah jadi : Selisih nilai stok barang setengah jadi akhir tahun dikurangi dengan stok awal tahun.
- Penerimaan lain dari jasa non industry : Komposisi nilai output adalah persentase dari masing-masing komponen nilai output terhadap nilai output.

Sumber Data :

- Survei Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang
- Survei Industri Mikro dan Kecil

Metode Pengumpulan Data

- a. Survei Industri Besar Sedang (IBS) Tahunan dilakukan secara lengkap kepada semua perusahaan industri yang tergolong besar dan sedang yang tercatat dalam Direktori Industri BPS (pencacahan lengkap).
- b. Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan dilakukan secara sampel.
- c. Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) dilakukan secara sampel.
- d. Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan dilakukan dengan mengamati panel sampel selama satu tahun.

Ruang Lingkup

- a. Perusahaan Industri Besar dan Sedang yang dicakup dalam survei IBS Tahunan dan IBS Bulanan adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih, termasuk perusahaan industri yang baru mulai berproduksi secara komersial.
- b. Perusahaan Industri Mikro dan Kecil yang dicakup dalam survei IMK Tahunan dan Triwulanan adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1-19 orang.

1.9. KETENAGAKERJAAN

Penduduk **usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

Penduduk yang termasuk **angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk **bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Contoh:

1. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/ peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
2. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
3. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya

Penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

1. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
2. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
3. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang

bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (own account worker) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan:

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

1.10. KEMISKINAN

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Untuk Indonesia kemiskinan dihitung dengan pengeluaran minimum makanan yang didekati dengan kebutuhan 2100 kkalori ditambah dengan kebutuhan bukan makanan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Kemiskinan relatif diartikan bahwa kemiskinan seseorang timbul dikarenakan faktor pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihitung dengan standarisasi nilai uang suatu negara yang disepakati bersama, yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Garis kemiskinan dengan menggunakan nilai uang ini tidak berubah, walaupun nilai barang mengalami perubahan setiap saat. Garis kemiskinan absolut ini dapat digunakan untuk membandingkan kemiskinan antar daerah. **Nilai absolut** yang digunakan adalah dengan 2 nilai yaitu: US \$1 /kapita/hari dan US 2\$/kapita/hari. US`\$ yang digunakan adalah nilai tukar terhadap kemampuan daya beli standar (*Purchasing Power Parity*) dan bukan nilai tukar resmi yang digunakan didalam perdagangan komersial antar negara (*Exchange rate*).

Kemiskinan Struktural adalah Kemiskinan yang dinilai dari kultur dan adat budaya setempat yang mengelompokkan manusia dalam berbagai tingkatan kehidupan. Kemiskinan struktural lebih bersifat menetes kebawah (*trickle down effect*) dikarenakan penataan arah pembangunan yang tidak merata sehingga suatu daerah, atau kelompok masyarakat akan tetap berada didalam kondisi miskin. Sebagai contoh adalah terisolirnya tempat tinggal penduduk dari berbagai akses guna pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi.

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Penjelasan Teknis dan Sumber Data

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
2. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
5. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan September 2018 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Bulan September 2018. Dan untuk kemiskinan Maret 2018 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Bulan Maret 2018.
6. Sejak tahun 2015 terjadi pergeseran sampel besar dari Susenas September ke Susenas Maret, sehingga hasil Susenas Maret 2017 (termasuk angka kemiskinan) dapat mewakili sampai level kabupaten/kota, sedangkan Susenas September 2017 hanya sampai level provinsi.

1.11. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat

2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

Manfaat IPM :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Variabel dalam IPM Metode Baru :

UMUR Harapan Hidup Saat Lahir - UHH (Life Expectancy - e0)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Rata-rata Lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (Expected Years of Schooling - EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-

PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Sumber Data

- o Umur Harapan Hidup saat lahir: Sensus Penduduk 2010 (SP-2010), Proyeksi Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015).

- o Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kesehatan } I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

$$\text{Indeks Pendidikan } I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$\text{Indeks Pengeluaran } I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel berikut.

Komponen	Satuan	Min	Max
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	18
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rupiah	1 007 436	26 572 352

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt{I_{UHH} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

ii. Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok "Sangat Tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "Tinggi": $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "Sedang": $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "Rendah": $IPM < 60$

II. PENDAHULUAN

Pada Hakekatnya pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sejak semula telah disadari bahwa pembangunan bukanlah hal yang mudah karena mencakup banyak segi dan multi dimensi. Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap dan bidangnya. Oleh karena kebutuhannya bersifat terus menerus dan tersebar disegala bidang itulah, maka usaha pembangunan harus dibarengi juga dengan kebutuhan untuk setiap saat menyempurnakan dan mengembangkan data statistik yang ada. Pengukuran hasil-hasil pembangunanpun menjadi beraneka ragam. Segala macam data dikumpulkan, baik sebagai data dasar maupun sebagai indikator untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan pada UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah secara terus menerus telah menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan nasional. Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang program-program pembangunan ini dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam Otonomisasi Daerah sekarang ini, selanjutnya menjadi acuan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai isu-isu dan prioritas pembangunan di provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam peningkatan kesejahteraan penduduk, pembangunan ekonomi dalam kurun waktu 2015-2019 diupayakan dapat menyelesaikan masalah-masalah pokok yang mengakibatkan masih rendahnya kesejahteraan rakyat. **Presiden Joko Widodo mengungkapkan Sembilan Agenda Prioritas atau lebih dikenal nama *Nawa Cita*** yang menjadi cetak biru arah kebijakan pemerintahannya. Kesembilan agenda prioritas tersebut adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut harus menjadi acuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Perkembangan agenda prioritas ini secara terus menerus perlu dipantau karena pencapaian sasaran tersebut menggambarkan hasil kinerja pemerintah selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong harus diikuti terealisasinya kesembilan agenda prioritas tersebut. Seyogyanya terdapat korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan kebutuhan dasar masyarakat dan pengurangan kesenjangan.

<https://kaltim.bps.go.id>

III. URAIAN RINGKAS

Dari berbagai data yang disajikan dalam publikasi ini dapat dilakukan telaahan dan analisa tentang kondisi saat ini dan kecenderungan serta kesimpulan beberapa indikator sebagai berikut:

3.1. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2019 diperkirakan mencapai angka 3,72 juta jiwa yang menempati pada 7 Kabupaten 3 Kota, 103 kecamatan, 841 desa, dan 197 kelurahan. Perkembangan jumlah penduduk Kalimantan Timur 2018-2019 menunjukkan pertumbuhan yang masih dikategorikan tinggi yaitu 1,99 persen, bahkan masih lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional. Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Kutai Timur sebesar 3,99 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya pertumbuhannya berkisar 0,11 persen - 2,55 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Pada tahun 2019 porsi terbesar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (23,45%), yang merupakan ibukota Provinsi di Kalimantan Timur. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (21,12%), Kota Balikpapan (17,61%) dan tersebar di kabupaten/kota lain berkisar 0,70 persen - 10,11 persen. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2010 tidak banyak berubah.

Gambar 3.1.1
Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur, 2014 - 2018



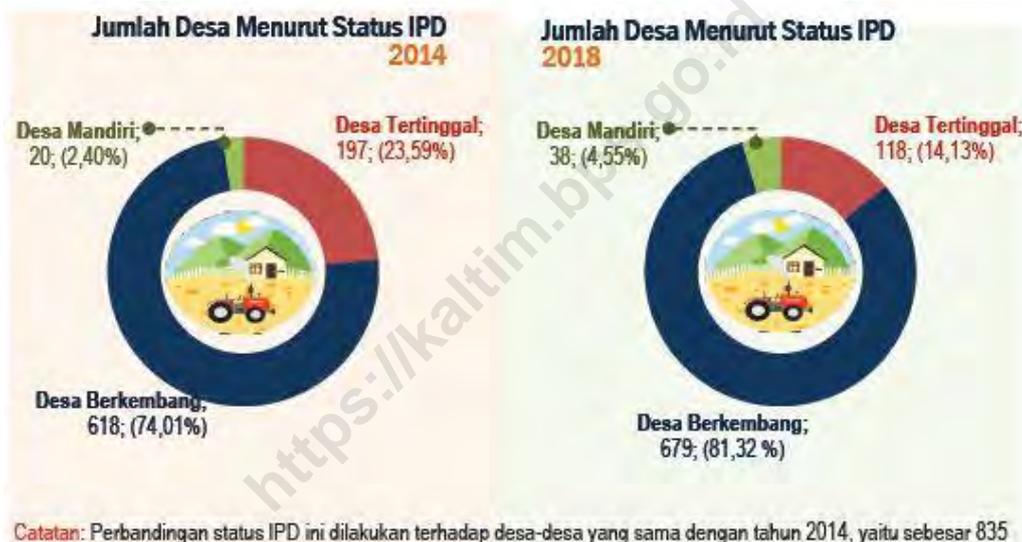
Pola persebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah, terutama antar kabupaten dengan kota. Wilayah kabupaten dengan luas 98,91 persen dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 54,17 persen dari total penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya, yaitu 43,81 persen menetap di kota yang luasnya hanya 1,09 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur. Akibatnya kepadatan penduduk di kabupaten hanya berkisar 1 sampai 55 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 1.279 jiwa/km², Kota Samarinda 1.218 jiwa/km², dan Kota Bontang 1.089 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk Kalimantan Timur adalah 29 jiwa/km². Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya penduduk migrasi yang masuk ke daerah ini sebagai konsekuensi dari era otonomi, dimana daerah yang masih menjanjikan peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik akan menjadi tujuan migran.

Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 mencantumkan sebanyak 111 pulau kecil terluar. Berdasarkan hasil Pendataan Podes 2018, 111 pulau kecil terluar tersebut berada di 22 provinsi, 49 kabupaten/kota, 117 kecamatan, dan 543 desa/kelurahan. Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 5 desa/kelurahan di 2 pulau kecil terluar yang seluruhnya terletak di Kabupaten Berau. Dua Pulau terluar yaitu Pulau Sambit dan Pulau Maratua yang meliputi 5 desa/kelurahan.

Pada tahun 2018, sebagian besar desa di Indonesia termasuk dalam kategori Desa Berkembang dan sebagian kecil desa yang dikategorikan sebagai Desa Mandiri. Jumlah desa kategori Desa Mandiri pada tahun 2018, bertambah sebanyak 18 desa dibandingkan tahun 2014. Sementara itu, Desa Tertinggal berkurang sebesar 79 desa. Gambar 3 menyajikan perkembangan jumlah desa menurut status IPD di 835 desa yang sama, yang telah ada sejak tahun 2014.

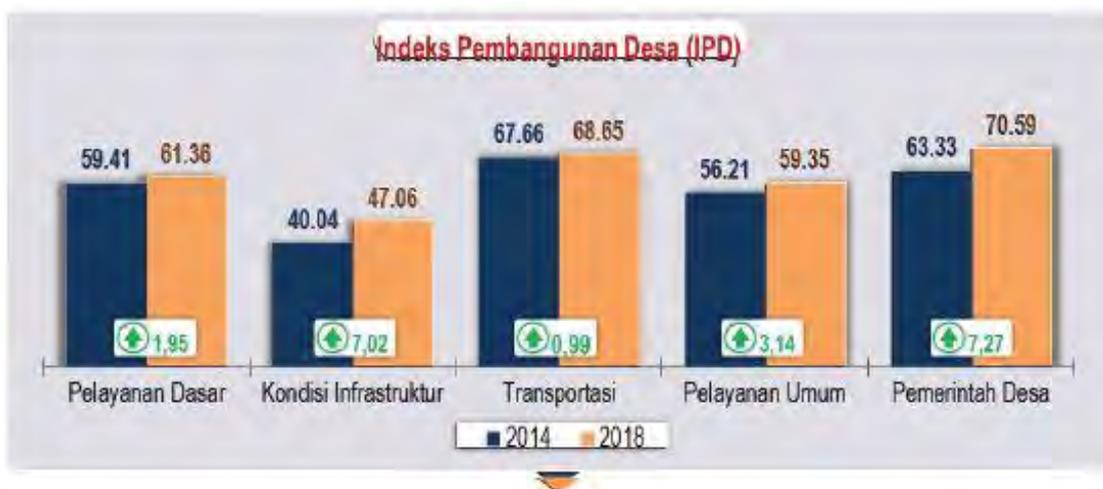
Gambar 3.1.2

Jumlah Desa Menurut Kategori IPD Provinsi Kalimantan Timur, 2014 - 2018



Gambar 3.1.3

Perkembangan IPD Menurut Dimensi Penyusun IPD Provinsi Kalimantan Timur, 2014 dan 2018



Indeks Pembangunan Desa disusun dari 5 dimensi, yang terdiri dari 42 indikator. Secara umum, semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu sebesar 7,27 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Transportasi, yaitu sebesar 0,99 poin. Secara lebih rinci, tingkat kenaikan IPD menurut dimensi penyusun dapat dilihat pada Gambar 3.1.3.

Tantangan Desa/Kelurahan

a. Bencana Alam

Selain potensi yang dapat terus berkembang, pembangunan desa/kelurahan juga tidak luput dari beragam permasalahan yang dapat menjadi kendala sekaligus tantangan desa/kelurahan di masa yang akan datang. Salah satu tantangannya yaitu bencana alam, yang perlu menjadi perhatian. Jenis bencana alam yang didata pada Podes 2018 adalah tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/topan, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan (lahan). Pendataan Podes 2018 di Kalimantan Timur mencatat bahwa desa/kelurahan yang terdampak bencana alam selama tiga tahun terakhir yaitu meliputi bencana banjir terjadi di 411 desa/kelurahan, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 137 desa, dan tanah longsor terjadi di 77 desa/kelurahan.

b. Pencemaran

Dalam pendataan Podes 2018 yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pendataan Podes 2018 menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Timur masih banyak desa/kelurahan yang mengalami pencemaran lingkungan hidup di wilayahnya dalam setahun terakhir. Pencemaran yang paling banyak terjadi adalah pencemaran air, kemudian disusul dengan pencemaran udara dan tanah.

c. Keamanan

Keamanan lingkungan merupakan salah satu faktor utama kenyamanan suatu wilayah. Keamanan lingkungan salah satunya dapat terganggu karena adanya tindak kejahatan. Pada pendataan Podes 2018 yang dimaksud dengan tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut dapat diancam hukuman penjara atau kurungan dalam setahun terakhir. Jenis tindakan kejahatan yang didata adalah pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan/penggelapan, penganiyaan, pembakaran, perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan, penyalahgunaan/peredaran narkoba, perjudian, pembunuhan, perdagangan orang (trafficking), dan korupsi, serta perkelahian massal. Namun demikian, yang disajikan hanya terkait penyalahgunaan/peredaran narkoba dan perkelahian massal. Tabel 4 menyajikan jumlah desa/kelurahan yang di wilayahnya terjadi pencurian, penyalahgunaan/pengedaran narkoba, perjudian dan perkelahian massal.

3.2. PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN/INFLASI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I 2019

A. INDEKS HARGA KONSUMEN/INFLASI MENURUT KELOMPOK

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (Inflasi/Deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat Inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari 2019 mengalami inflasi sebesar 0,56 persen, atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 138,45 pada bulan Desember 2018 menjadi 139,22 pada bulan Januari 2019. Inflasi tahun kalender pada bulan Januari 2019 sebesar 0,56 persen dan Inflasi tahun ke tahun sebesar 3,48 persen. Inflasi di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar 2,87 persen diikuti oleh kelompok sandang sebesar 0,82 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,22 persen, kemudian kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,18 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,13 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen. Sementara itu untuk kelompok transportasi dan komunikasi mengalami deflasi sebesar -0,79 persen.

Pada bulan Januari 2019 6 kelompok memberikan andil positif yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,555 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,058 persen, kelompok sandang dengan andil sebesar 0,045 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,026 persen kemudian kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,012 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,003 persen. Untuk kelompok transportasi dan komunikasi memiliki andil negatif sebesar -0,143 persen. Jika dirinci menurut kota, pada bulan Januari 2019, Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,60 persen dengan IHK 138,85. Sementara Kota Balikpapan mengalami inflasi 0,50 persen dengan IHK 139,72. Pada bulan Januari 2019 Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar 0,60 persen dan inflasi tahun ke tahun Kota Samarinda sebesar 3,50 persen. Sedangkan Inflasi tahun kalender Kota Balikpapan yaitu sebesar 0,50 persen dan inflasi tahun ke tahun Kota Balikpapan pada Januari 2019 sebesar 3,45 persen.

Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Februari 2019 mengalami deflasi sebesar -0,01 persen, atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 139,22 pada bulan Januari 2019 menjadi 139,20 pada bulan Februari 2019. Inflasi tahun kalender pada bulan Februari 2019 sebesar 0,54 persen dan Inflasi tahun ke tahun sebesar 3,23 persen. Inflasi di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar -0,93 persen. Enam kelompok lainnya mengalami peningkatan indeks yaitu kelompok transportasi dan komunikasi mengalami inflasi sebesar 0,54 persen diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,22 persen, kelompok sandang sebesar 0,19 persen kemudian kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,11 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen.

Pada bulan Februari 2019, 6 kelompok memberikan andil positif yaitu kelompok transportasi dan komunikasi dengan andil sebesar 0,097 persen diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang memiliki andil sebesar 0,043 persen, kelompok sandang sebesar 0,011 persen kemudian kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,007 persen, kelompok perumahan dengan andil sebesar 0,004 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberi andil sebesar 0,003 persen. Untuk kelompok bahan makanan memiliki andil negatif sebesar -0,179 persen. Jika dirinci menurut kota, pada bulan Februari 2019, Kota Samarinda mengalami Deflasi sebesar -0,18 persen dengan IHK 138,60. Sementara Kota Balikpapan mengalami inflasi 0,20 persen dengan IHK 140,00. Pada bulan Februari 2019 Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar 0,42 persen dan inflasi tahun ke tahun Kota Samarinda sebesar 2,99 persen. Sedangkan Inflasi tahun kalender Kota Balikpapan yaitu sebesar 0,70 persen dan inflasi tahun ke tahun Kota Balikpapan pada Februari 2019 sebesar 3,54 persen.

Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Maret 2019 mengalami deflasi sebesar -0,18 persen, atau terjadi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 139,20 pada bulan Februari 2019 menjadi 138,95 pada bulan Maret 2019. Inflasi tahun kalender pada bulan Maret 2019 sebesar 0,36 persen dan Inflasi tahun ke tahun sebesar 2,99 persen. Deflasi di Kalimantan Timur dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar -1,27 persen diikuti oleh kelompok kesehatan sebesar -0,22 persen, kelompok transportasi dan komunikasi mengalami deflasi sebesar -0,19 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar mengalami deflasi sebesar -0,04 persen. Sementara itu 3 kelompok lainnya mengalami inflasi yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,45 persen kemudian kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,31 persen dan kelompok sandang sebesar 0,14 persen.

Pada bulan Maret 2019, 4 kelompok memberikan andil negatif yaitu kelompok bahan makanan dengan andil sebesar -0,245 persen diikuti oleh kelompok transportasi dan komunikasi sebesar -0,035 persen, kelompok kesehatan sebesar -0,012 persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dengan andil sebesar -0,010 persen. Sementara itu 3 kelompok lainnya memberikan andil positif yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau dengan andil sebesar 0,091 persen kemudian kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,021 persen dan kelompok sandang sebesar 0,007 persen. Jika dirinci menurut kota, pada bulan Maret 2019, Kota Samarinda mengalami Deflasi sebesar -0,11 persen dengan IHK 138,45. Sementara Kota Balikpapan mengalami deflasi -0,28 persen dengan IHK 139,61. Pada bulan Maret 2019 Inflasi tahun kalender Kota Samarinda sebesar 0,31 persen dan inflasi tahun ke tahun Kota Samarinda sebesar 3,01 persen. Sedangkan Inflasi tahun kalender Kota Balikpapan yaitu sebesar 0,42 persen dan inflasi tahun ke tahun Kota Balikpapan pada Maret 2019 sebesar 2,97 persen.

B. PERBANDINGAN INFLASI TAHUNAN

Pada bulan Januari tahun 2019 Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,56 persen. Sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya, yaitu pada Januari 2018 Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,32 persen dan pada Januari 2017 mengalami inflasi sebesar 1,04 persen. Inflasi tahun kalender pada bulan Januari 2019 tercatat sebesar 0,56 persen dan pada Januari 2018 mengalami inflasi sebesar 0,32 persen dan pada tahun Januari 2017 mengalami inflasi sebesar 1,04 persen. Inflasi tahun ke tahun pada Januari 2019 sebesar 3,48 persen dan pada Januari 2018 tercatat sebesar 2,41 persen dan pada Januari 2017 dengan inflasi sebesar 4,27 persen. Jika

dirinci menurut kota, Samarinda pada bulan Januari 2019 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen, sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami inflasi sebesar 0,43 persen dan tahun 2017 mengalami inflasi 1,02 persen. Kota Balikpapan bulan Januari 2019 mengalami inflasi 0,50 persen, dan tahun 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,19 persen sedangkan tahun 2017 mengalami inflasi sebesar 1,08.

Pada bulan Januari 2019 Inflasi Tahun Kalender Kota Samarinda sebesar 0,60 persen, sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami inflasi sebesar 0,43 persen dan tahun 2017 mengalami Inflasi 1,02 persen. Inflasi Tahun Kalender Kota Balikpapan pada bulan Januari 2019 mencapai 0,50 persen, dan tahun 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,19 persen dan tahun 2017 mengalami inflasi sebesar 1,08 persen. Inflasi tahun ke tahun Kota Samarinda bulan Januari 2019 sebesar 3,50 persen, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan tahun 2017 masing-masing tercatat sebesar 3,08 persen dan 3,35 persen. Kemudian Inflasi tahun ke tahun Kota Balikpapan bulan Januari 2019 tercatat sebesar 3,45 persen, dan dua tahun sebelumnya Inflasi tahun ke tahun pada tahun 2018 dan tahun 2017 masing-masing sebesar 1,55 persen dan 5,48 persen.

Gambar 3.2.1
Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Timur dan Nasional
Bulan Januari 2018 – Januari 2019



Pada bulan Februari tahun 2019 Kalimantan Timur mengalami deflasi sebesar -0,01 persen. Sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya, yaitu pada Februari 2018 Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,23 persen dan pada Februari 2017 mengalami deflasi sebesar -0,04 persen. Inflasi tahun kalender pada bulan Februari 2019 tercatat sebesar 0,54 persen dan pada Februari 2018 mengalami inflasi sebesar 0,55 persen dan pada tahun Februari 2017 mengalami inflasi sebesar 1,00 persen. Inflasi tahun ke tahun pada Februari 2019 sebesar 3,23 persen dan pada Februari 2018 tercatat sebesar 2,69 persen dan pada Februari 2017 dengan inflasi sebesar 3,98 persen. Jika dirinci menurut kota, Samarinda pada bulan Februari 2019 mengalami deflasi sebesar -0,18 persen, sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami inflasi sebesar 0,31 persen dan tahun 2017 mengalami inflasi 0,13 persen. Kota Balikpapan bulan Februari 2019 mengalami inflasi 0,20 persen, dan tahun 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,11 persen sedangkan tahun 2017 mengalami deflasi sebesar -0,26 persen.

Pada bulan Februari 2019 Inflasi Tahun Kalender Kota Samarinda sebesar 0,42 persen, sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami inflasi sebesar 0,74 persen dan tahun 2017 mengalami Inflasi 1,15 persen. Inflasi Tahun Kalender Kota Balikpapan pada bulan Februari 2019 mencapai 0,70 persen, dan tahun 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,30 persen dan tahun 2017 mengalami inflasi sebesar 0,81 persen. Inflasi tahun ke tahun Kota Samarinda bulan Februari 2019 sebesar 2,99 persen, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan tahun 2017 masing-masing tercatat sebesar 3,27 persen dan 3,44 persen. Kemudian Inflasi tahun ke tahun Kota Balikpapan bulan Februari 2019 tercatat sebesar 3,54 persen, dan dua tahun sebelumnya Inflasi tahun ke tahun pada tahun 2018 dan tahun 2017 masing-masing sebesar 1,93 persen dan 4,68 persen.

Gambar 3.2.2
Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Timur dan Nasional
Bulan Februari 2018 – Februari 2019



Pada bulan Maret tahun 2019 Kalimantan Timur mengalami deflasi sebesar -0,11 persen. Sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya, yaitu pada Maret 2018 Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,05 persen dan pada Maret 2017 mengalami inflasi sebesar 0,15 persen. Inflasi tahun kalender pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 0,36 persen dan pada Maret 2018 mengalami inflasi sebesar 0,60 persen dan pada tahun Maret 2017 mengalami inflasi sebesar 1,15 persen. Inflasi tahun ke tahun pada Maret 2019 sebesar 2,99 persen dan pada Maret 2018 tercatat sebesar 2,59 persen dan pada Maret 2017 dengan inflasi sebesar 3,89 persen. Jika dirinci menurut kota, Samarinda pada bulan Maret 2019 mengalami deflasi sebesar -0,11 persen, sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami deflasi sebesar -0,12 persen dan tahun 2017 mengalami inflasi 0,28 persen. Kota Balikpapan bulan Maret 2019 mengalami deflasi -0,28 persen, dan tahun 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,27 persen sedangkan tahun 2017 mengalami deflasi sebesar -0,03 persen.

Pada bulan Maret 2019 Inflasi Tahun Kalender Kota Samarinda sebesar 0,31 persen, sedangkan pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami inflasi sebesar 0,62 persen dan tahun 2017 mengalami Inflasi 1,44 persen. Inflasi Tahun Kalender Kota Balikpapan pada bulan Maret 2019 mencapai 0,42 persen, dan tahun 2018 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dan tahun 2017 mengalami inflasi sebesar 0,78 persen. Inflasi tahun ke

tahun Kota Samarinda bulan Maret 2019 sebesar 3,01 persen, pada periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan tahun 2017 masing-masing tercatat sebesar 2,85 persen dan 3,27 persen. Kemudian Inflasi tahun ke tahun Kota Balikpapan bulan Maret 2019 tercatat sebesar 2,97 persen, dan dua tahun sebelumnya Inflasi tahun ke tahun pada tahun 2018 dan tahun 2017 masing-masing sebesar 2,24 persen dan 4,69 persen.

Gambar 3.2.3
Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Timur dan Nasional
Bulan Maret 2018 – Maret 2019



C. PERBANDINGAN INFLASI ANTAR KOTA

Inflasi Bulan Januari 2019 dari 82 kota Inflasi yang dilaporkan yaitu sebanyak 73 kota mengalami inflasi dan 9 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 1,23 persen dan terendah terjadi di Kota Pematang Siantar sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar -0,87 persen dan terendah di Kota Merauke yaitu sebesar -0,01 persen. Sementara itu kondisi kota-kota lain yang berada di Pulau Kalimantan di luar Kota Samarinda dan Balikpapan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Singkawang sebesar 1,19 persen, Kota Tarakan yaitu sebesar 0,96 persen diikuti Kota Banjarmasin sebesar 0,82 persen, Kota Tanjung dengan inflasi sebesar 0,75 persen, Kota Pontianak sebesar 0,55 persen, Kota Palangka Raya sebesar 0,56 persen dan Kota Sampit sebesar 0,34 persen.

Inflasi Bulan Januari 2019 dari 82 kota Inflasi yang dilaporkan yaitu sebanyak 13 kota mengalami inflasi dan 69 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 2,98 persen dan terendah terjadi di Kota Kendari sebesar 0,03 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Merauke sebesar -2,11 persen dan terendah di Kota Serang yaitu sebesar -0,02 persen. Sementara itu kondisi kota-kota lain yang berada di Pulau Kalimantan di luar Kota Samarinda dan Balikpapan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,53 persen kemudian Kota Singkawang sebesar 0,49 persen dan Kota Palangkaraya inflasi sebesar 0,09 persen. Sedangkan kota lainnya mengalami deflasi yaitu Kota Tanjung deflasi sebesar -0,67 persen, Kota Sampit deflasi

-0,65 persen, Kota Banjarmasin deflasi sebesar -0,07 persen dan Kota Tarakan deflasi sebesar -0,03 persen.

Inflasi Bulan Maret 2019 dari 82 kota Inflasi yang dilaporkan yaitu sebanyak 51 kota mengalami inflasi dan 31 kota lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 0,86 persen dan terendah terjadi di Kota Tangerang dan Bekasi yaitu masing-masing sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar -3,03 persen dan terendah di Kota Palembang, Batam dan Sampit masing-masing sebesar -0,01 persen. Sementara itu kondisi kota-kota lain yang berada di Pulau Kalimantan di luar Kota Samarinda dan Balikpapan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 0,27 persen dan Kota Tanjung sebesar 0,07 persen. Sedangkan Kota lainnya mengalami deflasi yaitu Kota Tarakan deflasi sebesar -0,63 persen diikuti oleh Kota Singkawang sebesar -0,60 persen, Kota Pontianak sebesar -0,19 persen kemudian Kota Palangkaraya deflasi sebesar -0,03 persen dan Kota Sampit deflasi -0,01 persen.

<https://kaltim.bps.go.id>

3.3. PERKEMBANGAN EKSPOR DAN IMPOR KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I 2019

A. PERKEMBANGAN EKSPOR

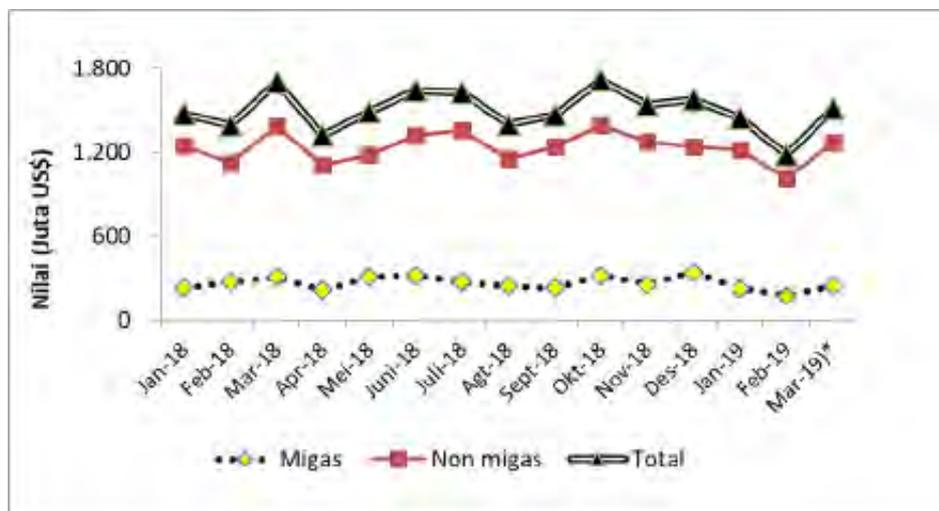
A.1. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada Januari 2019 mengalami penurunan sebesar 8,66 persen dibanding Desember 2018, yaitu dari US\$ 1,58 miliar menjadi US\$ 1,44 miliar. Penurunan ekspor Januari 2019 didorong oleh turunnya ekspor barang migas dan barang non migas. Ekspor barang migas Januari 2019 mencapai US\$ 0,22 miliar, turun 34,27 persen dibanding Desember 2018. Sementara ekspor barang non migas Januari 2019 mencapai US\$ 1,22 miliar, turun 1,60 persen dibanding Desember 2018. Begitu pula bila dibandingkan dengan Januari 2018, nilai ekspor Januari 2019 mengalami penurunan sebesar 2,24 persen, dimana ekspor barang migas mengalami penurunan sebesar 1,63 persen dan ekspor barang non migas turun sebesar 2,36 persen.

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 17,86 persen dibanding Januari 2019 yaitu dari US\$ 1,44 miliar menjadi US\$ 1,19 miliar. Penurunan ekspor Februari 2019 didorong oleh turunnya ekspor barang migas dan barang non migas. Ekspor barang migas Februari 2019 mencapai US\$ 0,17 miliar, turun 22,54 persen dibanding Januari 2019. Sementara ekspor barang non migas Februari 2019 mencapai US\$ 1,01 miliar, turun 17,00 persen dibanding Januari 2019.

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar 27,57 persen dibanding Februari 2019 yaitu dari US\$ 1,19 miliar menjadi US\$ 1,51 miliar. Peningkatan ekspor Maret 2019 didorong oleh naiknya ekspor barang migas dan barang non migas. Ekspor barang migas Maret 2019 mencapai US\$ 0,24 miliar, naik 40,46 persen dibanding Februari 2019. Sementara ekspor barang non migas Maret 2019 mencapai US\$ 1,27 miliar, naik 25,36 persen dibanding Februari 2019.

Gambar 3.3.1
Perkembangan Ekspor Kalimantan Timur
Januari 2018 – Maret 2019



A.2. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Persentase kenaikan terbesar ekspor pada Januari 2019 dibandingkan dengan Desember 2018 terjadi pada golongan kayu dan barang dari kayu (44) sebesar 72,11 persen dari US\$ 7,22 juta menjadi US\$ 12,43 juta. Sedangkan persentase penurunan terbesar terjadi pada golongan pupuk (31) sebesar 92,80 persen dari US\$ 21,42 juta menjadi sebesar US\$ 1,54 juta.

Persentase kenaikan terbesar ekspor pada Februari 2019 dibandingkan dengan Januari 2019 terjadi pada golongan Aneka produk kimia (38) sebesar 521,54 persen. Sedangkan persentase penurunan terbesar terjadi pada golongan Kayu dan barang dari kayu (44) sebesar 30,63 persen dari US\$ 12,43 juta menjadi sebesar US\$ 8,63 juta.

Persentase kenaikan terbesar ekspor pada Maret 2019 dibandingkan dengan Februari 2019 terjadi pada golongan Instrumen dan aparatus optis, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis dan bedah; bagian dan aksesorinya (90), namun perannya terhadap ekspor Kalimantan Timur masih terbilang kecil. Sedangkan persentase penurunan terbesar terjadi pada golongan Lemak dan minyak hewani atau nabati (15) sebesar 17,75 persen dari US\$ 60,26 juta menjadi sebesar US\$ 49,56 juta.

A.3. Ekspor Migas Menurut Negara Tujuan Utama

Negara tujuan utama ekspor migas Provinsi Kalimantan Timur pada Januari 2019 adalah Jepang, Tiongkok dan Singapura, nilainya masing-masing mencapai US\$ 168,20 juta, US\$ 45,17 juta dan US\$ 11,15 juta. Persentase kenaikan terbesar ekspor migas Januari 2019 dibandingkan dengan Desember 2018 terjadi ke negara Jepang sebesar 64,34 persen. Sedangkan persentase penurunan terbesar terjadi ke negara Tiongkok sebesar 75,36 persen yaitu dari US\$ 183,30 juta menjadi sebesar US\$ 45,17 juta.

Negara tujuan utama ekspor migas Provinsi Kalimantan Timur pada Februari 2019 ke Negara Jepang dan Tiongkok masing-masing mencapai US\$ 161,24 juta, US\$ 12,67 juta. Persentase penurunan terbesar ekspor migas Februari 2019 dibandingkan dengan Januari 2019 terjadi ke negara Tiongkok sebesar 71,94 persen.

Negara tujuan utama ekspor migas Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2019 ke Negara Jepang, Tiongkok dan Taiwan masing-masing mencapai US\$ 122,84 juta, US\$ 67,37 juta dan US\$ 54,06 juta. Persentase kenaikan terbesar ekspor migas Maret 2019 dibandingkan dengan Februari 2019 terjadi ke negara Tiongkok sebesar 431,63 persen. Sedangkan penurunan terbesar ekspor migas Maret 2019 dibandingkan dengan Februari 2019 terjadi ke negara Jepang sebesar 23,81 persen.

A.4 Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan Utama

Negara tujuan utama ekspor non migas Provinsi Kalimantan Timur pada Januari 2019 adalah ke Negara India, Tiongkok dan Jepang masing-masing mencapai US\$ 299,92 juta, US\$ 263,04 juta dan US\$ 123,65 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 56,32 persen. Persentase kenaikan terbesar ekspor non migas Januari 2019 jika dibandingkan dengan Desember 2018 terjadi ke negara Bangladesh sebesar 112,66 persen, yaitu dari US\$ 25,95 juta menjadi sebesar US\$ 55,18 juta. Sedangkan persentase penurunan terbesar ekspor non migas terjadi ke negara Vietnam sebesar 26,04 persen, yaitu dari US\$ 35,06 juta menjadi sebesar US\$ 25,93 juta.

Negara tujuan utama ekspor non migas Provinsi Kalimantan Timur pada Februari 2019 adalah ke Negara India, Tiongkok dan Malaysia masing-masing mencapai US\$ 283,18 juta, US\$ 211,76 juta dan US\$ 100,17 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 58,81 persen. Persentase kenaikan terbesar ekspor non migas Februari 2019 jika dibandingkan dengan Januari 2019 terjadi ke negara Malaysia sebesar 14,93 persen, yaitu dari US\$ 87,16 juta menjadi sebesar US\$ 100,17 juta. Sedangkan persentase penurunan terbesar ekspor non migas terjadi ke negara Taiwan sebesar 59,34 persen, yaitu dari US\$ 109,57 juta menjadi sebesar US\$ 44,56 juta.

Negara tujuan utama ekspor non migas Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2019 adalah ke Negara India, Tiongkok dan Jepang masing-masing mencapai US\$ 372,18 juta, US\$ 294,54 juta dan US\$ 132,54 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 63,00 persen. Persentase kenaikan terbesar ekspor non migas Maret 2019 jika dibandingkan dengan Februari 2019 terjadi ke negara Thailand sebesar 114,68 persen, yaitu dari US\$ 28,56 juta menjadi sebesar US\$ 61,32 juta. Sedangkan persentase penurunan terbesar ekspor non migas terjadi ke negara Bangladesh sebesar 61,68 persen, yaitu dari US\$ 57,86 juta menjadi sebesar US\$ 22,17 juta.

B. PERKEMBANGAN IMPOR

B.1. Impor Migas dan Non Migas

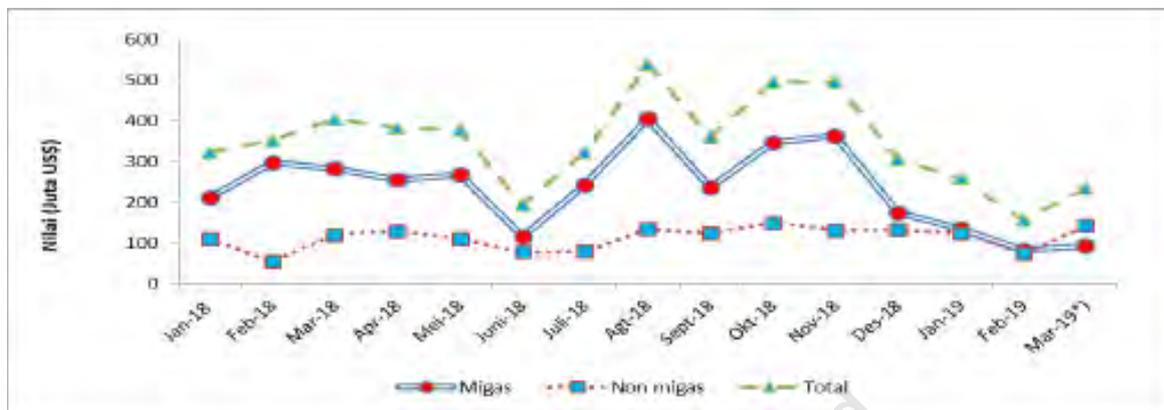
Impor Provinsi Kalimantan Timur Januari 2019 mencapai US\$ 0,26 miliar atau mengalami penurunan sebesar 14,98 persen dibanding dengan impor Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh turunnya impor barang migas dan barang non migas. Impor barang migas Januari 2019 mencapai US\$ 0,13 miliar, turun 22,32 persen dibanding Desember 2018. Sementara impor barang non migas Januari 2019 mencapai US\$ 0,12 miliar, turun sebesar 5,33 persen dibanding Desember 2018. Jika dibandingkan dengan Januari 2018, nilai impor Januari 2019 mengalami penurunan sebesar 19,63 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya impor barang migas sebesar 36,64 persen.

Impor Provinsi Kalimantan Timur Februari 2019 mencapai US\$ 0,16 miliar atau mengalami penurunan sebesar 40,05 persen dibanding dengan impor Januari 2019. Sementara bila dibanding Februari 2018 mengalami penurunan sebesar 55,77 persen. Impor barang migas Februari 2019 mencapai US\$ 0,08 miliar, turun 38,97 persen dibanding Januari 2019. Sementara impor barang non migas Februari 2019 mencapai US\$ 0,07 miliar, turun sebesar 41,21 persen dibanding Januari 2019. Secara kumulatif nilai impor Provinsi Kalimantan Timur periode Januari-Februari 2019 mencapai US\$ 0,42 miliar atau naik 38,48 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Dari seluruh impor periode Januari- Februari 2019, impor barang migas mencapai US\$ 0,22 miliar atau turun 57,46 persen dan barang non migas mencapai US\$ 0,20 miliar atau naik sebesar 20,35 persen.

Impor Provinsi Kalimantan Timur Maret 2019 mencapai US\$ 0,23 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 50,52 persen dibanding dengan impor Februari 2019. Sementara bila dibanding Maret 2018 mengalami penurunan sebesar 41,98 persen. Impor barang migas Maret 2019 mencapai US\$ 0,09 miliar, naik 12,25 persen dibanding Februari 2019. Sementara impor barang non migas Maret 2019 mencapai US\$ 0,14 miliar, naik sebesar 93,42 persen dibanding Februari 2019. Secara kumulatif nilai impor Provinsi Kalimantan Timur periode Januari-Maret 2019 mencapai US\$ 0,81 miliar atau turun 25,36 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Dari

seluruh impor periode Januari- Maret 2019, impor barang migas mencapai US\$ 0,39 miliar atau turun 50,66 persen dan barang non migas mencapai US\$ 0,41 miliar atau naik sebesar 45,16 persen.

Gambar 3.3.2
Perkembangan Impor Kalimantan Timur
Januari 2018 - Maret 2019



B.2. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit

Persentase kenaikan terbesar impor pada Januari 2019 terhadap Desember 2018 terjadi pada golongan Perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantal kursi dan perabotan yang diisi semacam itu ; lampu dan alat kelengkapan penerangan; papan/tanda iluminasi; bangunan prefabrikasi (94) namun perannya terhadap impor Kalimantan Timur masih terbilang kecil. Sedangkan persentase penurunan terbesar terjadi pada golongan Bahan Bakar Mineral (27) sebesar 22,54 persen, yaitu dari US\$ 174,18 juta menjadi sebesar US\$ 134,92 juta.

Persentase penurunan terbesar impor pada Februari 2019 terhadap Januari 2019 terjadi pada golongan aneka produk kimia (38) sebesar 72,30 persen, yaitu dari US\$ 4,59 juta menjadi US\$ 1,27 juta. Sedangkan persentase kenaikan terbesar terjadi pada golongan Bahan kimia anorganik (28) sebesar 1 052,95 persen, yaitu dari US\$ 0,11 juta menjadi sebesar US\$ 1,22 juta.

Persentase kenaikan terbesar impor pada Maret 2019 terhadap Februari 2019 terjadi pada golongan Bahan kimia organik(29) namun perannya terhadap impor Kalimantan Timur masih terbilang kecil.

B.3. Impor Migas Menurut Negara Asal

Negara asal utama impor migas Provinsi Kalimantan Timur pada Januari 2019 adalah negara Nigeria, Angola dan Republik Korea masing-masing mencapai US\$ 61,16 juta, US\$ 47,73 juta dan US\$ 21,41 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 96,58 persen. Persentase peningkatan terbesar impor migas Januari 2019 jika dibandingkan dengan Desember 2018 berasal dari negara Singapura sebesar 52,62 persen, yaitu dari US\$ 2,19 juta menjadi US\$ 3,34 juta. Sedangkan persentase penurunan terbesarnya berasal dari negara Republik Korea sebesar 44,93 persen.

Negara asal utama impor migas Provinsi Kalimantan Timur pada Februari 2019 adalah negara Singapura, Republik Korea dan Malaysia masing-masing mencapai US\$ 32,22 juta, US\$ 25,56 juta dan US\$ 23,30 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 98,46 persen. Persentase

peningkatan terbesar impor migas Februari 2019 jika dibandingkan dengan Januari 2019 berasal dari negara Singapura sebesar 865,31 persen, yaitu dari US\$ 3,34 juta menjadi US\$ 32,22 juta. Sedangkan persentase penurunan terbesarnya berasal dari negara Thailand sebesar 55,04 persen.

Negara asal utama impor migas Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2019 adalah negara Nigeria, Republik Korea dan Singapura masing-masing mencapai US\$ 60,46 juta, US\$ 28,31 juta dan US\$ 2,43 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 98,67 persen. Persentase peningkatan terbesar impor migas Maret 2019 jika dibandingkan dengan Februari 2019 berasal dari negara Thailand sebesar 21,94 persen, yaitu dari US\$ 0,16 juta menjadi US\$ 0,20 juta. Sedangkan persentase penurunan terbesarnya berasal dari negara Singapura sebesar 92,45 persen.

B.4. Impor Non Migas Menurut Negara Asal

Negara asal utama impor non migas Provinsi Kalimantan Timur pada Januari 2019 adalah Tiongkok, United States dan Singapura masing-masing mencapai US\$ 46,11 juta, US\$ 21,16 juta dan US\$ 13,67 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 64,78 persen. Persentase kenaikan terbesar impor non migas Januari 2019 jika dibandingkan dengan Desember 2018 berasal dari negara United States sebesar 66,28 persen, sedangkan persentase penurunan impor non migas terjadi dari negara Malaysia sebesar 72,92 persen, yaitu dari US\$ 6,45 juta menjadi sebesar US\$ 1,75 juta.

Negara asal utama impor non migas Provinsi Kalimantan Timur pada Februari 2019 adalah Tiongkok, Malaysia dan Singapura masing-masing mencapai US\$ 16,70 juta, US\$ 12,41 juta dan US\$ 9,39 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 52,41 persen. Persentase kenaikan terbesar impor non migas Februari 2019 jika dibandingkan dengan Januari 2019 berasal dari negara Malaysia sebesar 610,31 persen, sedangkan persentase penurunan impor non migas terjadi dari negara Prancis sebesar 76,44 persen, yaitu dari US\$ 8,47 juta menjadi sebesar US\$ 2,00 juta.

Negara asal utama impor non migas Provinsi Kalimantan Timur pada Maret 2019 adalah Tiongkok, United States dan Singapura masing-masing mencapai US\$ 64,79 juta, US\$ 15,80 juta dan US\$ 15,16 juta, dengan peranan ketiga negara tersebut mencapai 67,39 persen. Persentase kenaikan terbesar impor non migas Maret 2019 jika dibandingkan dengan Februari 2019 berasal dari negara Filipina, sedangkan persentase penurunan impor non migas terjadi dari negara Malaysia sebesar 67,54 persen, yaitu dari US\$ 12,41 juta menjadi sebesar US\$ 4,02 juta.

C. NERACA PERDAGANGAN

Pada bulan Januari 2019 neraca perdagangan ekspor impor surplus sebesar US\$ 1,18 miliar, angka ini mengalami penurunan dibanding neraca perdagangan pada bulan Desember 2018 yang surplus sebesar US\$ 1,27 miliar. Secara kumulatif dari Januari-Desember 2018 neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur surplus sebesar US\$ 13,80 miliar, angka ini mengalami penurunan dibanding dengan neraca perdagangan pada periode yang sama di tahun 2017 yang surplus sebesar US\$ 14,25 miliar.

Pada bulan Februari 2019 neraca perdagangan ekspor impor surplus sebesar US\$ 1,03 miliar, angka ini mengalami penurunan dibanding neraca perdagangan pada bulan Januari 2019 yang surplus sebesar US\$ 1,18 miliar. Secara kumulatif dari Januari-Februari 2019 neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur surplus sebesar US\$ 2,21 miliar, angka ini mengalami penurunan

dibanding dengan neraca perdagangan pada periode yang sama di tahun 2018 yang surplus sebesar US\$ 2,20 miliar.

Pada bulan Maret 2019 neraca perdagangan ekspor impor surplus sebesar US\$ 1,28 miliar, angka ini mengalami peningkatan dibanding neraca perdagangan pada bulan Februari 2019 yang surplus sebesar US\$ 1,03 miliar. Secara kumulatif dari Januari- Maret 2019 neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur surplus sebesar US\$ 3,34 miliar, angka ini mengalami penurunan dibanding dengan neraca perdagangan pada periode yang sama di tahun 2018 yang surplus sebesar US\$ 3,49 miliar.

<https://kaltim.bps.go.id>

3.4. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) KALIMANTAN TIMUR*)

MENURUT SUBSEKTOR TRIWULAN I 2019

*) Termasuk Provinsi Kalimantan Utara

A. NILAI TUKAR PETANI

Nilai tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur* dengan tahun dasar 2012, NTP Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Januari 2019 sebesar 94,18 yang berarti petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012). NTP pada bulan Januari 2019 turun 0,31 persen dibandingkan NTP bulan Desember 2018, yaitu dari 94,48 menjadi 94,18. Hal ini disebabkan meningkatnya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,65 persen sedangkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) hanya meningkat sebesar 0,33 persen. Peningkatan NTP hanya terjadi pada subsektor peternakan dengan persentase 1,21 persen sedangkan subsektor lainnya mengalami penurunan NTP. NTPP mengalami penurunan 1,07 persen, NTPH mengalami penurunan 0,61 persen, NTPR mengalami penurunan 0,70 persen, dan NTPN mengalami penurunan 0,13 persen. Penurunan NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan.

NTP Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Februari 2019 sebesar 94,47 yang berarti petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012). NTP pada bulan Februari 2019 naik 0,31 persen dibandingkan NTP bulan Januari 2019, yaitu dari 94,18 menjadi 94,47. Hal ini disebabkan menurunnya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dibanding bulan lalu, sedangkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami peningkatan yang sangat kecil sehingga dapat dikatakan It hampir tidak mengalami perubahan. Penurunan NTP hanya terjadi pada subsektor peternakan dengan persentase 1,08 persen sedangkan subsektor lainnya mengalami peningkatan NTP. NTPP mengalami peningkatan 0,34 persen, NTPH mengalami peningkatan 0,45 persen, NTPR mengalami peningkatan 0,92 persen, dan NTPN mengalami peningkatan 1,04 persen. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor perikanan.

NTP Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Maret 2019 sebesar 94,95 yang berarti petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012). NTP pada bulan Maret 2019 naik 0,51 persen dibandingkan NTP bulan Februari 2019, yaitu dari 94,47 menjadi 94,95. Hal ini disebabkan meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan menurunnya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Penurunan NTP hanya terjadi pada subsektor peternakan dengan persentase 1,51 persen sedangkan subsektor lainnya mengalami peningkatan NTP. NTPP mengalami peningkatan 0,09 persen, NTPH mengalami peningkatan 1,18 persen, NTPR

mengalami peningkatan 1,93 persen, dan NTNP mengalami peningkatan 0,95 persen. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat.

Gambar 3.4.1
NTP Provinsi Kalimantan Timur *)
Maret 2018 - Maret 2019



*Termasuk Provinsi Kalimantan Utara

B. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI (It)

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) merupakan nilai produksi yang dijual petani dari tiap jenis barang hasil pertanian. Dari Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani.

Pada Januari 2019, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 123,56, menunjukkan bahwa tingkat harga produksi pertanian pada Januari 2019 mengalami kenaikan secara rata-rata 23,56 persen terhadap produk yang sama di tahun dasar (2012). Sama seperti bulan sebelumnya, It Januari 2019 mengalami peningkatan 0,33 persen dari It bulan Desember 2018 yang pada saat itu sebesar 123,16. Jika dilihat berdasarkan subsektornya, hanya subsektor peternakan dan perikanan yang mengalami peningkatan It masing-masing sebesar 2,04 persen dan 0,44 persen sedangkan subsektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat masing-masing mengalami penurunan It sebesar 0,42 persen dan 0,12 persen. Subsektor hortikultura dapat dikatakan tidak mengalami perubahan It karena persentase perubahannya hampir mendekati 0.

Pada Februari 2019, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 123,56, menunjukkan bahwa tingkat harga produksi pertanian pada Februari 2019 mengalami kenaikan secara rata-rata 23,56 persen terhadap produk yang sama di tahun dasar (2012). It pada bulan Februari secara umum dapat dikatakan tidak mengalami perubahan karena persentase perubahannya hampir mendekati 0. Tetapi jika dilihat berdasarkan subsektornya, masing-masing subsektor mengalami pergerakan It baik itu penurunan maupun peningkatan. Ada dua subsektor yang mengalami penurunan It yaitu subsektor tanaman pangan dan peternakan dengan persentase masing-masing 0,01 persen dan 1,27 persen. Di sisi lain, subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan

perikanan mengalami peningkatan It dengan persentase masing-masing 0,07 persen, 0,51 persen, dan 0,98 persen.

Pada Maret 2019, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 124,14, menunjukkan bahwa tingkat harga produksi pertanian pada Maret 2019 mengalami kenaikan secara rata-rata 24,14 persen terhadap produk yang sama pada tahun dasar (2012). It pada bulan Maret secara umum mengalami peningkatan 0,46 persen. Jika dilihat per subsektor, hanya subsektor peternakan yang mengalami penurunan It dengan persentase 1,61 persen. Sedangkan, subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami persentase peningkatan It paling besar yaitu 1,91 persen.

C. INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI (Ib)

Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) merupakan nilai barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani untuk menghasilkan tanaman yang diusahakan. Dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan khususnya petani yang merupakan bagian terbesar, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.

Pada bulan Januari 2019, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 131,20, meningkat sebesar 0,65 persen bila dibandingkan Desember 2018. Peningkatan indeks harga yang dibayar petani disumbang oleh peningkatan indeks kelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,71 persen serta indeks kelompok BPPBM yang meningkat 0,38 persen dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan Ib terjadi di semua subsektor pertanian dimana subsektor peternakan mengalami peningkatan Ib paling besar di antara subsektor lainnya.

Pada bulan Februari 2019, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 130,80, menurun sebesar 0,31 persen bila dibandingkan Januari 2019. Penurunan indeks harga yang dibayar petani disumbang oleh penurunan indeks kelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,46 persen sedangkan indeks kelompok BPPBM sedikit meningkat 0,24 persen dibanding bulan sebelumnya. Penurunan Ib terjadi di semua subsektor pertanian dimana subsektor perkebunan rakyat mengalami penurunan Ib paling besar di antara subsektor lainnya.

Pada bulan Maret 2019, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 130,74, sedikit menurun sebesar 0,04 persen bila dibandingkan Februari 2019. Penurunan indeks harga yang dibayar petani disumbang oleh penurunan indeks kelompok konsumsi rumah tangga sebesar 0,08 persen sedangkan indeks kelompok BPPBM sedikit meningkat 0,07 persen dibanding bulan sebelumnya. Penurunan Ib terjadi di semua subsektor pertanian dimana subsektor peternakan mengalami penurunan Ib paling besar di antara subsektor lainnya.

D. PERKEMBANGAN NTP SUBSEKTOR

D.1. NTP Subsektor Tanaman Pangan/Padi dan Palawija (NTPP)

Pada bulan Januari 2019, NTPP mengalami penurunan sebesar 1,07 persen terhadap bulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh It yang menurun 0,42 persen sedangkan Ib meningkat sebesar 0,66 persen. Penurunan It subsektor tanaman pangan terjadi pada semua kelompok baik kelompok padi maupun palawija. Kelompok padi sedikit menurun 0,19 persen

sedangkan kelompok palawija menurun cukup banyak yaitu sebesar 1,47 persen dari bulan sebelumnya. Di sisi lain, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) terus mengalami peningkatan pada kedua kelompok baik indeks konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,72 persen maupun indeks BPPBM yaitu 0,31 persen terhadap bulan Desember 2018.

Pada bulan Februari 2019, NTPP mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen terhadap bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan Ib yang lebih besar daripada penurunan It. It hanya menurun 0,01 persen sedangkan Ib menurun 0,35 persen dibanding bulan Januari. Penurunan It terjadi hanya pada kelompok padi, sedangkan kelompok palawija mengalami peningkatan. Di sisi lain, penurunan Ib hanya terjadi pada kelompok konsumsi rumah tangga dengan persentase penurunan sebesar 0,44 persen sedangkan kelompok BPPBM meningkat 0,20 persen.

Pada bulan Maret 2019, NTPP mengalami peningkatan sebesar 0,09 persen terhadap bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan It sebesar 0,06 persen dan penurunan Ib sebesar 0,02. Sama seperti bulan sebelumnya, penurunan It hanya terjadi pada kelompok padi, sedangkan kelompok palawija mengalami peningkatan. Di sisi lain, penurunan Ib hanya terjadi pada kelompok konsumsi rumah tangga dengan persentase penurunan sebesar 0,03 persen sedangkan kelompok BPPBM sedikit meningkat 0,01 persen.

D.2. NTP Subsektor Hortikultura (NTPH)

NTPH mengalami penurunan sebesar 0,61 persen pada bulan Januari 2019. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sedangkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) cenderung tetap/tidak mengalami perubahan yang berarti. Tetapi jika dilihat berdasarkan kelompoknya, It kelompok sayur-sayuran dan tanaman obat masing-masing meningkat 0,91 persen dan 1,50 persen sedangkan It kelompok buah-buahan mengalami penurunan 0,83 persen. Di sisi lain, Ib juga terus meningkat dengan persentase peningkatan bulan ini sebesar 0,61 persen terhadap bulan sebelumnya. Peningkatan tersebut disumbang oleh kedua kelompok baik indeks konsumsi rumah tangga maupun indeks BPPBM.

NTPH mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen pada bulan Februari 2019. Hal ini disebabkan oleh penurunan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang sedikit meningkat 0,07 persen. Jika dilihat berdasarkan kelompoknya, It kelompok sayur-sayuran mengalami penurunan indeks sebesar 0,12 persen sedangkan kelompok lainnya mengalami peningkatan. Kelompok buah-buahan yang pada bulan lalu menurun sekarang mengalami sedikit peningkatan dengan persentase 0,12 persen. Di sisi lain, Ib yang pada bulan-bulan sebelumnya mengalami peningkatan, pada Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Penurunan tersebut hanya terjadi pada kelompok konsumsi rumah tangga yang menurun 0,48 persen sedangkan kelompok BPPBM tetap mengalami peningkatan pada Februari 2019.

NTPH kembali mengalami peningkatan pada bulan Maret 2019 dengan persentase peningkatan 1,18 persen. Persentase peningkatan pada Maret 2019 lebih besar daripada persentase peningkatan pada Februari 2019 (terhadap Januari 2019). Peningkatan NTPH pada Maret 2019 disebabkan oleh peningkatan It sebesar 1,12 persen dan disertai dengan penurunan Ib sebesar 0,05 persen. Jika dilihat berdasarkan kelompoknya, It kelompok sayur-sayuran yang

sebelumnya sempat mengalami penurunan, pada Maret 2019 mengalami sedikit peningkatan 0,44 persen. Selain itu, indeks pada kelompok buah-buahan juga mengalami peningkatan sebesar 1,81 persen. Sedangkan, indeks pada kelompok tanaman obat menurun 0,56 persen. Di sisi lain, penurunan yang terjadi pada Ib disebabkan oleh turunnya indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,08 persen sedangkan indeks BPPBM tetap mengalami peningkatan.

D.3. NTP Subsektor Perkebunan Rakyat (NTPR)

NTPR terus mengalami penurunan dimana di bulan Januari nilainya menurun sebesar 0,70 persen terhadap bulan sebelumnya. Persentase penurunan tersebut lebih kecil dibanding persentase penurunan pada bulan sebelumnya (bulan Desember terhadap November). Penurunan NTPR Januari disebabkan karena Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menurun sebesar 0,12 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) meningkat sebesar 0,59 persen. Dengan demikian, NTPR Januari 2019 menjadi yang terendah selama kurun waktu setahun terakhir dengan nilai 80,12. Artinya, petani perkebunan rakyat mengalami defisit/penurunan daya beli karena harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012). Peningkatan Ib subsektor perkebunan rakyat terjadi pada kedua kelompok baik konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,64 persen maupun indeks BPPBM yang meningkat 0,36 persen.

NTPR mulai mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 0,92 persen pada bulan Februari 2019. NTPR mengalami peningkatan setelah sejak bulan September 2018 terus mengalami penurunan. Peningkatan tersebut sama seperti tahun lalu dimana pada Februari 2018 NTPR juga mulai mengalami peningkatan. Peningkatan NTPR terjadi karena meningkatnya It sebesar 0,51 persen dibanding bulan Januari 2019. Selain itu, Ib juga mengalami penurunan sebesar 0,40 persen. NTPR Februari 2019 sebesar 80,85. Artinya, petani perkebunan rakyat mengalami defisit/penurunan daya beli karena harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012). Penurunan Ib subsektor perkebunan rakyat hanya terjadi pada kelompok konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,52 persen sedangkan indeks BPPBM kembali meningkat 0,15 persen.

NTPR kembali meningkat dengan persentase peningkatan pada bulan Maret 2019 sebesar 1,93 persen. Peningkatan NTPR pada bulan Maret 2019 disebabkan peningkatan It tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,91 persen dan penurunan Ib sebesar 0,01 persen. Penurunan Ib hanya terjadi pada indeks kelompok konsumsi rumah tangga dengan persentase penurunan 0,06 persen sedangkan indeks kelompok BPPBM tetap mengalami peningkatan. NTPR Maret 2019 sebesar 82,41. Artinya, petani perkebunan rakyat mengalami defisit/ penurunan daya beli karena harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012).

D.4. NTP Subsektor Peternakan (NTPT)

Pada bulan Januari 2019, NTPT kembali mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 1,21 persen. Hal ini disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani meningkat sebesar 2,04 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani hanya meningkat 0,81 persen. Berbeda dengan subsektor perkebunan rakyat, NTPT Januari 2019 justru menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu

setahun terakhir. Jika dilihat berdasarkan kelompok It-nya, semua kelompok It pada subsektor peternakan meningkat kecuali kelompok ternak kecil. Peningkatan It paling tinggi terdapat pada kelompok unggas dengan persentase 2,40 persen. Di sisi lain, meningkatnya Ib di bulan Januari disebabkan oleh meningkatnya indeks kelompok konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,79 persen serta indeks BPPBM yang meningkat 0,86 persen.

Pada bulan Februari 2019, NTPT mengalami penurunan dengan persentase sebesar 1,08 persen. Hal ini disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani menurun sebesar 1,27 persen walaupun Indeks Harga yang Dibayar Petani juga menurun 0,18 persen pada Februari 2019. Walaupun mengalami penurunan, NTP pada subsektor peternakan tetap menjadi NTP dengan nilai paling tinggi di antara subsektor pertanian lainnya. Jika dilihat berdasarkan kelompok It-nya, hanya kelompok ternak kecil yang mengalami peningkatan indeks sedangkan kelompok ternak besar, unggas, dan hasil ternak mengalami penurunan. Penurunan It paling besar terjadi pada kelompok hasil ternak yang menurun 1,27 persen dibanding bulan sebelumnya. Di sisi lain, penurunan Ib di bulan Februari 2019 hanya terjadi pada kelompok konsumsi rumah tangga yang menurun 0,52 persen sedangkan kelompok BPPBM mengalami peningkatan 0,47 persen.

NTPT kembali mengalami penurunan dengan persentase penurunan sebesar 1,51 persen pada Maret 2019. Penurunan tersebut bahkan lebih besar daripada penurunan pada Februari 2019 (terhadap Januari 2019). Penurunan tersebut disebabkan karena It menurun 1,61 persen walaupun Ib juga menurun 0,11 persen. Sama seperti bulan sebelumnya, penurunan It pada Maret 2019 paling besar juga terjadi pada kelompok hasil ternak dengan persentase 1,63 persen. Selain itu, indeks pada kelompok unggas juga menurun 0,63 persen. Sedangkan, indeks pada kelompok ternak besar dan ternak kecil masing-masing meningkat 0,78 persen dan 0,03 persen. Selanjutnya, penurunan Ib terjadi pada kedua kelompok baik kelompok konsumsi rumah tangga maupun BPPBM dengan masing-masing persentase penurunan sebesar 0,11 persen dan 0,10 persen. Penurunan indeks pada kelompok BPPBM hanya terjadi pada subsektor peternakan. Walaupun mengalami penurunan, NTP pada subsektor peternakan tetap menjadi NTP dengan nilai paling tinggi di antara subsektor pertanian lainnya.

D.5. NTP Subsektor Perikanan (NTPN)

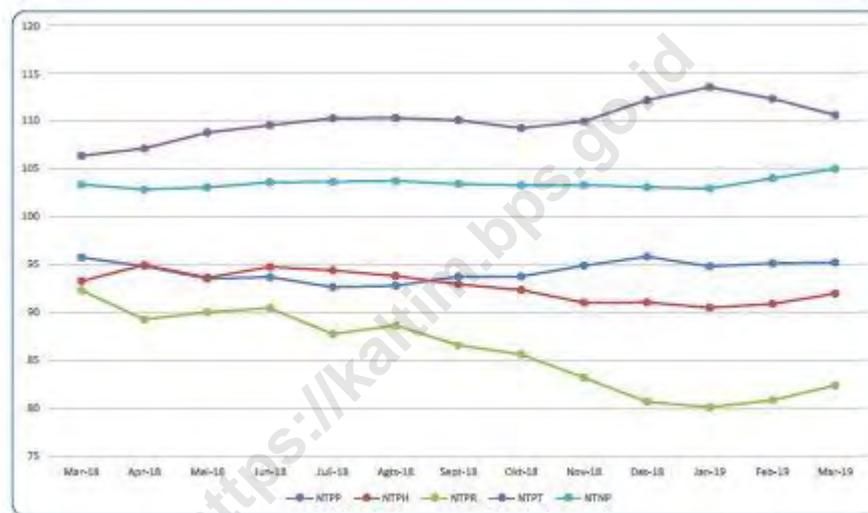
Pada bulan Januari 2019, NTPN kembali menurun sebesar 0,13 persen terhadap bulan sebelumnya. Penurunan NTPN disebabkan meningkatnya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,58 persen sedangkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) hanya meningkat 0,44 persen. Walaupun hanya sedikit mengalami peningkatan, peningkatan It di subsektor perikanan pada bulan Januari terjadi pada kedua kelompok baik kelompok perikanan tangkap maupun kelompok perikanan budidaya dengan persentase peningkatan masing-masing 0,08 persen dan 0,97 persen. Di sisi lain, peningkatan Ib juga terjadi pada kedua kelompok baik indeks konsumsi rumah tangga (0,74 persen) maupun indeks BPPBM (0,18 persen).

Pada bulan Februari 2019, NTPN kembali meningkat sebesar 1,04 persen setelah sebelumnya pada 2 bulan terakhir terus mengalami penurunan. Peningkatan NTPN terjadi karena It meningkat 0,98 persen. Selain itu, Ib juga mengalami sedikit penurunan 0,06 persen dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan It subsektor perikanan terjadi pada semua kelompok baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Kelompok perikanan tangkap mengalami peningkatan 1,55 persen sedangkan kelompok perikanan budidaya mengalami peningkatan 0,15

persen. Di sisi lain, penurunan lb hanya terjadi pada kelompok konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,24 persen sedangkan kelompok BPPBM meningkat 0,36 persen.

Pada bulan Maret 2019, NTNP kembali meningkat dengan persentase 0,95 persen dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan NTNP terjadi karena It meningkat 0,89 persen. Selain itu, lb juga mengalami sedikit penurunan 0,06 persen dibanding bulan sebelumnya. Sama seperti bulan sebelumnya, peningkatan It subsektor perikanan terjadi pada semua kelompok baik kelompok perikanan tangkap maupun kelompok perikanan budidaya. Kelompok perikanan tangkap mengalami peningkatan 0,92 persen sedangkan kelompok perikanan budidaya mengalami peningkatan 0,84 persen. Di sisi lain, penurunan lb hanya terjadi pada kelompok konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 0,16 persen sedangkan kelompok BPPBM meningkat 0,18 persen.

Gambar 3.4.2
NTP Per Subsektor Provinsi Kalimantan Timur *)
Januari 2018 - Januari 2019



*Termasuk Provinsi Kalimantan Utara

E. PERBANDINGAN ANTAR PROVINSI

Pada bulan Januari 2019, dari 33 provinsi yang dihitung NTP-nya, 18 provinsi mengalami penurunan NTP sedangkan sisanya meningkat. Penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Papua yaitu sebesar 1,58 persen sedangkan peningkatan NTP terbesar terjadi di Provinsi Riau dengan persentase sebesar 2,59 persen. Semua provinsi di wilayah Pulau Kalimantan mengalami penurunan NTP pada bulan Januari. Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan NTP paling besar sekaligus menjadi provinsi dengan NTP paling rendah di antara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.

Pada bulan Februari 2019, dari 33 provinsi yang dihitung NTP-nya, 18 provinsi mengalami penurunan NTP sedangkan sisanya meningkat. Penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 1,47 persen sedangkan peningkatan NTP terbesar kembali terjadi di Provinsi Riau dengan persentase sebesar 1,58 persen. Semua provinsi di wilayah Pulau Kalimantan mengalami peningkatan NTP kecuali Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan NTP paling tinggi di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan.

Pada bulan Maret 2019, dari 33 provinsi yang dihitung NTP-nya, 17 provinsi mengalami peningkatan NTP sedangkan sisanya menurun. Penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi DKI yaitu sebesar 2,43 persen sedangkan peningkatan NTP terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan persentase sebesar 1,41 persen. Di wilayah Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah mengalami peningkatan NTP sedangkan 2 provinsi lainnya menurun. Selain itu, NTP di tingkat nasional menurun 0,21 persen pada Maret 2019.

F. NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) menggambarkan seberapa besar tingkat pendapatan yang diterima petani yang digunakan hanya untuk kegiatan usaha, dalam hal ini untuk biaya produksi pertanian. NTUP tidak memperhitungkan harga yang digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga petani sehingga lebih menggambarkan tingkat pengeluaran riil untuk usaha pertanian. NTUP dihitung berdasarkan perbandingan nilai It dan komponen Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPM) pada kelompok Ib.

Sama seperti NTP, NTUP mengalami sedikit penurunan sebesar 0,05 persen pada Januari 2019. Jika dilihat per subsektor, ada 2 subsektor pertanian yang mengalami peningkatan NTUP yaitu subsektor peternakan (1,17 persen) dan subsektor perikanan (0,27 persen). Hanya subsektor perkebunan rakyat yang memiliki NTUP di bawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa petani subsektor perkebunan rakyat mengalami penurunan dalam hal perdagangan dimana harga yang mereka bayar (khususnya untuk produksi pertanian pada subsektor perkebunan rakyat) mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012).

NTUP pada Februari secara umum sebesar 106,03, mengalami penurunan sebesar 0,24 persen dibanding bulan sebelumnya. Jika dilihat per subsektor, hanya ada 2 subsektor pertanian yang mengalami peningkatan NTUP yaitu subsektor perkebunan rakyat (0,36 persen) dan subsektor perikanan (0,61 persen). Di sisi lain, subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan mengalami penurunan NTUP masing-masing sebesar 0,21 persen, 0,09 persen, dan 1,72 persen pada Februari 2019. Hanya subsektor perkebunan rakyat yang memiliki NTUP di bawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa petani subsektor perkebunan rakyat mengalami penurunan dalam hal perdagangan dimana harga yang mereka bayar (khususnya untuk produksi pertanian pada subsektor perkebunan rakyat) mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012).

Pada Maret 2019, terjadi peningkatan NTUP sebesar 0,39 persen. Hal ini terjadi karena It meningkat 0,46 persen sedangkan indeks pada kelompok BPPBM hanya meningkat 0,07 persen. Peningkatan NTUP sejalan dengan NTP yang juga mengalami peningkatan pada bulan ini. Jika dilihat per subsektor, semua subsektor pertanian mengalami peningkatan NTUP kecuali subsektor peternakan yang menurun 1,51 persen. Peningkatan NTUP paling besar terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yaitu sebesar 1,70 persen. Walaupun mengalami peningkatan, NTUP subsektor tanaman perkebunan rakyat masih memiliki nilai rasio di bawah 100. Hal ini menunjukkan bahwa petani subsektor perkebunan rakyat mengalami penurunan dalam hal perdagangan dimana harga yang mereka bayar (khususnya untuk produksi pertanian pada subsektor perkebunan rakyat) mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar (tahun 2012).

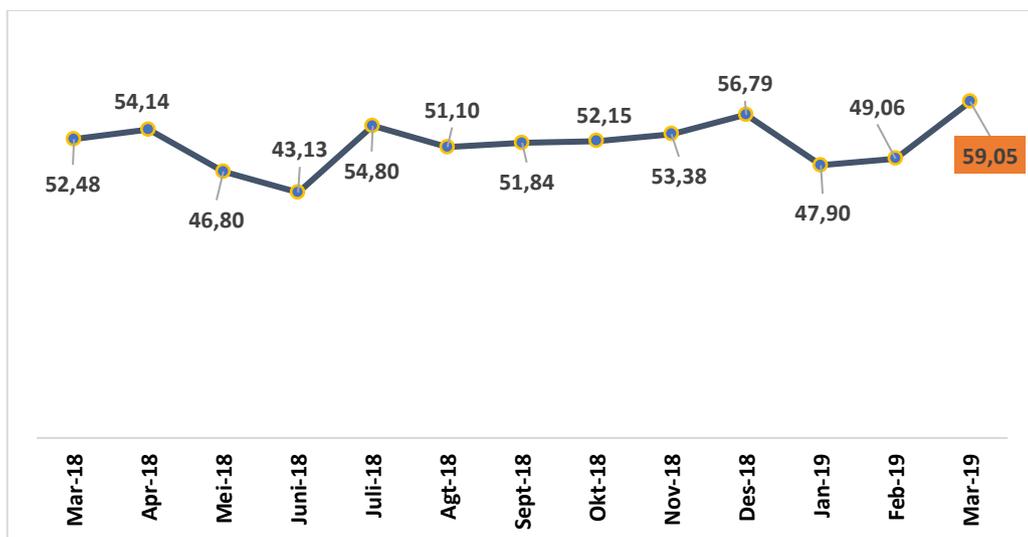
3.5. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK) HOTEL BERBINTANG BULAN TRIWULAN I 2019

A. TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR (TPK)

Pada bulan Februari 2019 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Timur sebesar 49,06 persen, hal ini berarti dari rata-rata jumlah kamar hotel berbintang di Kalimantan Timur terjual/terpakai sebanyak 49,06 persen dari seluruh kamar yang tersedia. TPK bulan Februari 2019 mengalami peningkatan 1,16 poin dibanding TPK bulan Januari 2019 sebesar 47,90 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Februari 2018, terjadi penurunan TPK sebesar 3,53 poin. Selanjutnya jika dilihat menurut klasifikasinya, pada bulan Februari 2019 hotel berbintang 2 mengalami TPK tertinggi yaitu mencapai 55,03 persen, dan TPK terendah pada hotel berbintang 1 sebesar 16,09 persen, sedangkan hotel berbintang lainnya masing-masing diantaranya hotel berbintang 3 sebesar 50,18 persen, hotel berbintang 4 sebesar 51,40 persen, dan hotel berbintang 5 tercatat sebesar 42,62 persen.

Pada bulan Maret 2019 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kalimantan Timur sebesar 59,05 persen, hal ini berarti dari rata-rata jumlah kamar hotel berbintang di Kalimantan Timur terjual/terpakai sebanyak 59,05 persen dari seluruh kamar yang tersedia. TPK bulan Maret 2019 mengalami peningkatan 10,00 poin dibanding TPK bulan Februari 2019 sebesar 49,06 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2018, terjadi peningkatan TPK sebesar 6,57 poin. Selanjutnya jika dilihat menurut klasifikasinya, pada bulan Maret 2019 hotel berbintang 5 mengalami TPK tertinggi yaitu mencapai 66,55 persen, dan TPK terendah pada hotel berbintang 1 sebesar 13,16 persen, sedangkan hotel berbintang lainnya masing-masing diantaranya hotel berbintang 2 sebesar 63,19 persen, hotel berbintang 3 sebesar 56,86 persen, dan hotel berbintang 4 tercatat sebesar 64,27 persen.

Gambar 3.5.1
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Kalimantan Timur
Maret 2018 – Maret 2019 (dalam persen)



TPK hotel berbintang 2 pada bulan Februari 2018 mengalami peningkatan sekitar 1,43 poin bila dibandingkan bulan Januari 2019 yang mencapai 53,60 persen. Sementara jika dibandingkan dengan periode Februari 2018 mengalami penurunan sekitar 19,48 poin yaitu dari 74,51 persen menjadi 55,03 persen.

TPK hotel berbintang 5 pada bulan Maret 2019 mengalami peningkatan sekitar **23,93 poin** bila dibandingkan bulan Februari 2019 yang mencapai 42,62 persen. Sementara jika dibandingkan dengan periode Maret 2018 mengalami kenaikan sekitar **14,33 poin** yaitu dari 52,22 persen menjadi 66,55 persen.

B. RATA-RATA LAMA MENGINAP

Secara umum rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang di Kalimantan Timur selama bulan Februari 2019 mengalami penurunan menjadi 0,39 hari dari rata-rata lama tamu menginap bulan sebelumnya sebesar 2,08 hari (turun 0,39 hari). Penurunan tersebut terjadi karena rata-rata lama menginap tamu nusantara pada Februari 2019 mengalami penurunan. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara pada bulan Februari 2019 dibanding Februari 2018, mengalami peningkatan 0,02 hari, sedangkan jumlah hari menginap tamu nusantara menurun sebesar 0,07 hari. Dari keseluruhan tamu hotel, rata-rata lama menginap di hotel berbintang pada bulan Februari 2019 lebih rendah jika dibanding Februari 2018. Apabila diamati dari perkembangan rata-rata lama tamu menginap setiap bulannya pada hotel berbintang pada kurun waktu Februari 2018-Februari 2019, maka rata-rata lama tamu menginap paling lama terjadi pada bulan Januari 2019 yaitu sebesar 2,08 hari dan bulan Februari 2019 dengan jumlah hari tersingkat untuk menginap yakni 1,69 hari.

Secara umum rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang di Kalimantan Timur selama bulan Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,01 hari dari rata-rata lama tamu menginap bulan sebelumnya sebesar 1,69 hari (naik 0,01 hari). Peningkatan tersebut terjadi karena rata-rata lama menginap tamu nusantara pada Maret 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,02 hari. Rata-rata lama menginap tamu mancanegara pada bulan Maret 2019 dibanding Maret 2018, mengalami penurunan sebesar 0,34 hari, hal ini juga berlaku pada jumlah hari menginap tamu nusantara yang juga menurun sebesar 0,07 hari. Dari keseluruhan tamu hotel, rata-rata lama menginap di hotel berbintang pada bulan Maret 2019 lebih rendah jika dibanding Maret 2018. Apabila diamati dari perkembangan rata-rata lama tamu menginap setiap bulannya pada hotel berbintang pada kurun waktu Maret 2018 – Maret 2019, maka rata-rata lama tamu menginap paling lama terjadi pada bulan Januari 2019 yaitu sebesar 2,08 hari dan bulan Februari 2019 dengan jumlah hari tersingkat untuk menginap yakni 1,69 hari.

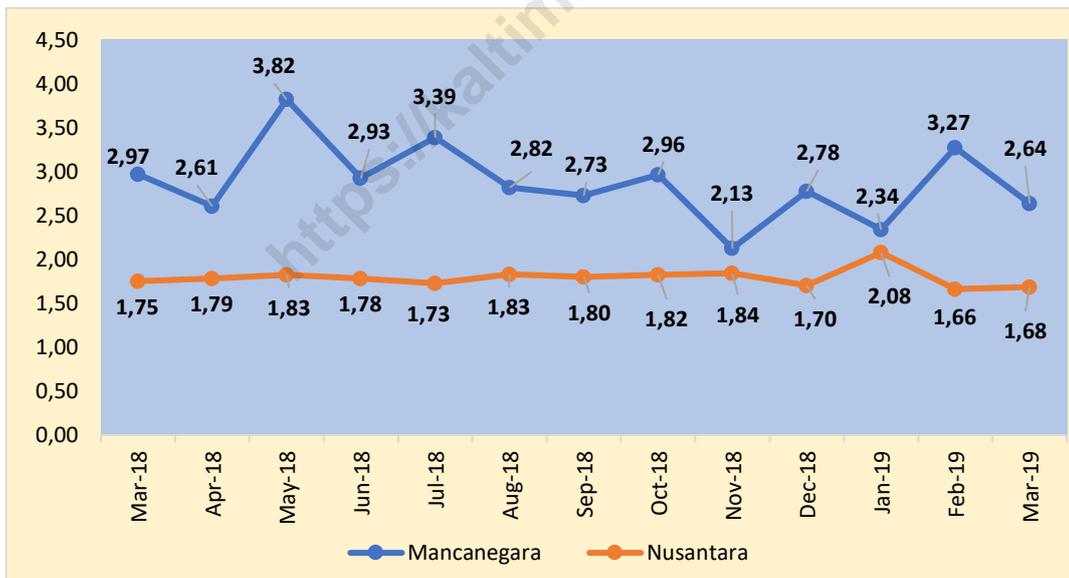
Gambar 3.5.2

Rata-rata (hari) Tamu Menginap Pada Hotel Berbintang di Provinsi Kalimantan Timur
Maret 2018-Maret 2019



Gambar 3.5.3

Rata-rata (hari) Tamu Menginap Pada Hotel Berbintang di Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Asal Tamu, Maret 2018-Maret 2019



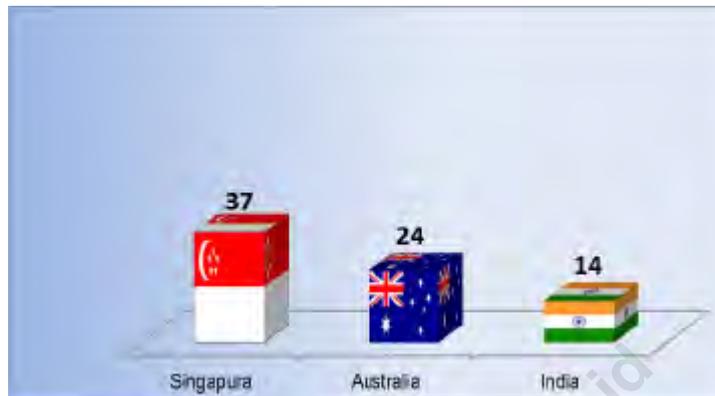
C. KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Januari 2019 tercatat sebesar 146 kunjungan atau berkurang 70 kunjungan dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 216 kunjungan. Sementara itu, jumlah wisman pada Januari 2019 mengalami penurunan jumlah jika dibandingkan dengan periode Januari 2018 yang mencapai 253 kunjungan. Secara kumulatif, pada periode Januari 2018 – Januari 2019 wisman yang berkunjung ke wilayah Kalimantan Timur telah 2.804 kunjungan. Menurut asal negara wisatawan mancanegara

(wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Januari 2019, terbanyak dilakukan oleh wisatawan asal Singapura, Australia dan India. Ketiga negara tersebut peranannya mencapai 51,37 persen terhadap total kunjungan pada bulan Januari 2019.

Gambar 3.5.4

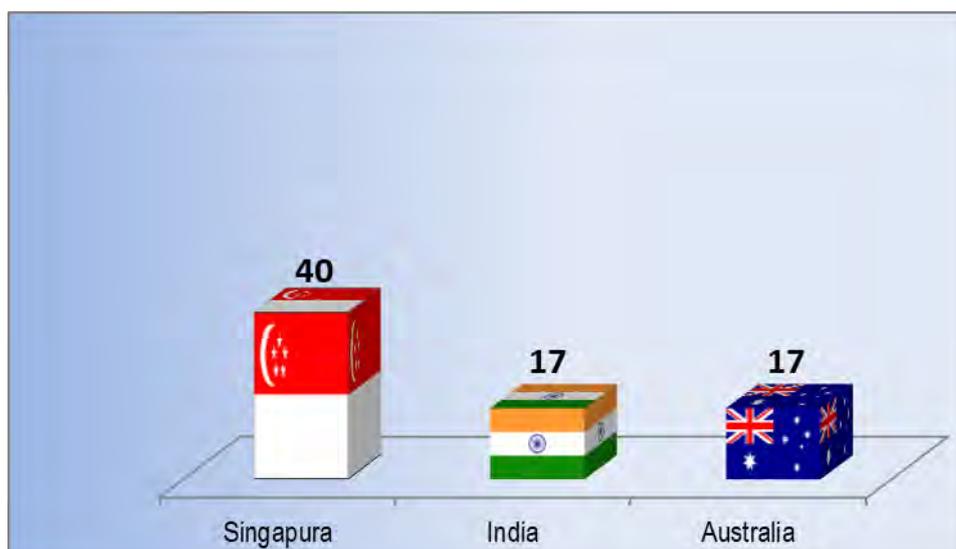
Distribusi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kebangsaan Januari 2019



Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Februari 2019 tercatat sebesar 168 kunjungan atau berkurang 38 kunjungan dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 206 kunjungan. Sementara itu, jumlah wisman pada Februari 2019 mengalami peningkatan jumlah jika dibandingkan dengan periode Februari 2018 yang mencapai 162 kunjungan. Secara kumulatif, pada periode Januari 2018 – Februari 2019 wisman yang berkunjung ke wilayah Kalimantan Timur telah mencapai 3.032 kunjungan. Menurut asal negara wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Februari 2019 terbanyak dilakukan oleh wisatawan asal Singapura, India dan Australia. Ketiga negara tersebut peranannya mencapai 44,05 persen terhadap total kunjungan pada bulan Februari 2019.

Gambar 3.5.5

Distribusi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kebangsaan Februari 2019



Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 188 kunjungan atau naik 20 kunjungan dibanding bulan sebelumnya yang berjumlah 168 kunjungan. Sementara itu, jumlah wisman pada Maret 2019 jika dibandingkan dengan periode Maret 2018 mengalami penurunan yaitu mencapai 60 kunjungan. Secara kumulatif, pada periode Januari 2018 – Maret 2019 wisman yang berkunjung ke wilayah Kalimantan Timur telah mencapai 3.220 kunjungan. Menurut asal negara wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Maret 2019 terbanyak dilakukan oleh wisatawan asal Singapura, India dan Malaysia. Ketiga negara tersebut perannya mencapai 31,38 persen terhadap total kunjungan pada bulan Maret 2019.

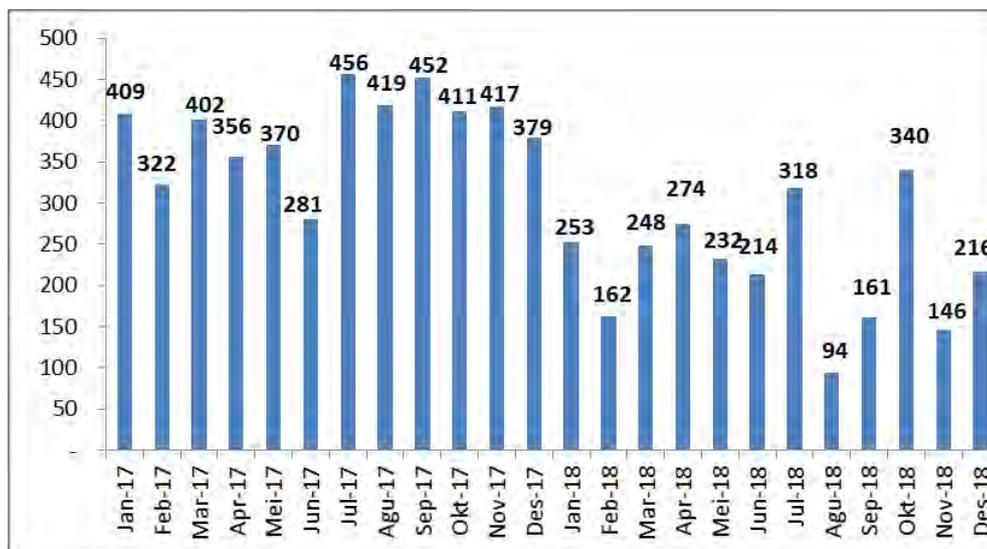
Gambar 3.5.6

Distribusi Wisatawan Mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kebangsaan Maret 2019



Gambar 3.5.7

Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur Januari 2018-Maret 2019



3.6. INDEKS TENDENSI KONSUMEN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I 2019

A. PENDAHULUAN

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi konsumen terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik melalui Survei Tendensi Konsumen (STK). ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang.

Jumlah sampel STK pada Triwulan I-2019 di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 323 rumah tangga yang tersebar di Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Kabupaten Berau. Responden STK tersebut dipilih dari kerangka sampel blok sensus Susenas Maret 2018 untuk daerah perkotaan. Untuk dapat mewakili gambaran aktivitas kegiatan konsumsi, maka populasi blok sensus yang dijadikan kerangka sampel berasal dari blok sensus dengan strata sedang dan tinggi berdasarkan "wealth index". Tahapan penarikan sampel dilakukan secara Two-Stage Two-Phase Sampling. Pertama-tama, sampel blok sensus STK dipilih secara sistematis pada setiap strata sesuai alokasi. Kedua, sampel rumah tangga STK dipilih secara sistematis berdasarkan stratifikasi tingkat pendidikan kepala rumah tangga hasil updating Susenas. Pemilihan sampel dilakukan secara panel antar triwulan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan persepsi konsumen antar waktu.

B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN TRIWULAN I-2019

Nilai ITK Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2019 sebesar 105,34 menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan Triwulan IV-2018 (nilai ITK sebesar 106,79). Namun demikian, tingkat optimisme konsumen mengalami penurunan, yang ditunjukkan oleh penurunan ITK sebesar 1,45 poin dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan rumah tangga dan peningkatan pada konsumsi barang/jasa serta peningkatan harga barang/jasa yang cenderung tidak berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, secara agregat nilai Indeks Tendensi Konsumen mengalami peningkatan menjadi sebesar 105,34.

Jika dilihat berdasarkan variabel pembentuknya, maka terdapat peningkatan pada komponen pendapatan rumah tangga pada triwulan ini dibanding triwulan sebelumnya, namun tidak diiringi oleh peningkatan yang sama pada tingkat volume konsumsi barang/jasa. Pada triwulan IV-2018, indeks pendapatan kini sebesar 106,68 lebih rendah dibandingkan indeks volume konsumsi yang mencapai 115,47. Sedangkan pada triwulan I-2019, indeks pendapatan kini sebesar 106,54 sedikit lebih tinggi dibandingkan indeks volume konsumsi yakni sebesar 104,10. Hal ini memperlihatkan adanya kecenderungan masyarakat menahan konsumsi dan mengalokasikan sebagian pendapatan untuk tabungan.

Peningkatan alokasi pendapatan rumah tangga untuk tabungan dapat terlihat dari hasil Survei Tendensi Konsumen (STK) yang mencatat hampir 70 persen responden menyatakan menabung pada triwulan ini, meningkat dibandingkan responden yang menabung pada triwulan sebelumnya

(64 persen). Mayoritas rumah tangga menabung dengan besaran yang relatif sama dengan triwulan lalu.

Tabel 3.6.1
Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Kalimantan Timur Menurut Variabel Pembentuknya, Triwulan IV-2018 dan Triwulan I-2019

Variabel Pembentuk	Triw. IV-2018	Triw. I-2019
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumahtangga kini	106,68	106,54
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	100,14	104,07
Tingkat konsumsi barang/jasa (bahan makanan/minuman, makanan/minuman jadi, rokok, tembakau, dan makan di restoran/rumah makan, pakaian, pembelian pulsa HP, pendidikan, rekreasi/hiburan, akomodasi, transportasi, serta perawatan kesehatan dan kecantikan).	115,47	104,10
Indeks Tendensi Konsumen (ITK)	106,79	105,34

Jika dilihat dari tingkat inflasi pada triwulan I-2019, maka terlihat bahwa terjadi peningkatan harga yang relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh besaran inflasi pada triwulan IV-2018 sebesar 0,31 persen, sedangkan pada triwulan I-2019 sebesar 0,36 persen. Indeks komponen pengaruh inflasi terhadap pola konsumsi pada triwulan ini tercatat sebesar 104,07, mengindikasikan bahwa inflasi relatif tidak berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat pada triwulan ini.

Secara umum, tingkat konsumsi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2019 ini rmeningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, walaupun terjadi perlambatan. Hal ini terlihat dari penurunan angka indeks konsumsi, yaitu dari 115,47 pada triwulan IV-2018 menjadi 104,10 di triwulan I-2019. Perlambatan indeks konsumsi ini seiring dengan berakhirnya momen Hari Raya Natal dan liburan sekolah yang terjadi pada triwulan IV-2018.

Jika dirinci berdasarkan indeks komoditinya, untuk kelompok indeks konsumsi makanan, tingkat konsumsi makanan masih meningkat pada Triwulan I-2019 jika dibandingkan triwulan sebelumnya walaupun sedikit mengalami perlambatan. Sedangkan untuk indeks konsumsi non makanan, terlihat bahwa tingkat konsumsi non makanan pada Triwulan I-2019 mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan sebelumnya.

Jika dirinci, terdapat 3 (tiga) kelompok barang/jasa yang tingkat konsumsinya mengalami penurunan dari triwulan yang lalu, yakni rekreasi/hiburan, akomodasi, dan perawatan kesehatan/kecantikan. Tingkat konsumsi kelompok Pakaian, Komunikasi, dan Transportasi masih mengalami peningkatan dibandingkan triwulan lalu walaupun mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan momen liburan sekolah dan Hari Raya Natal yang telah berakhir. Sedangkan pada komoditas Pendidikan, tingkat konsumsinya mengalami kenaikan jika dibandingkan triwulan lalu. Peningkatan ini disebabkan kembali aktifnya kegiatan pendidikan setelah berakhirnya momen liburan sekolah.

Tabel 3.6.2
Indeks Konsumsi Menurut Kelompok Barang dan Jasa
Triwulan IV-2018 dan Triwulan I-2019

Variabel Pembentuk	Trw IV-2018	Trw I-2019
(1)	(2)	(3)
A. Indeks Makanan	127,80	125,67
Bahan Makanan	133,97	133,86
Makanan dan Minuman Jadi	121,62	117,48
B. Indeks Non Makanan	111,95	97,94
Pakaian	114,95	103,89
Komunikasi (Pembelian Pulsa HP)	118,03	106,07
Pendidikan	93,49	103,18
Rekreasi/Hiburan	123,62	88,74
Akomodasi (Hotel/Penginapan)	101,97	80,35
Transportasi	125,17	105,19
Perawatan Kesehatan dan Kecantikan	106,42	98,13
Indeks Konsumsi Total	115,47	104,10

Gambar 3.6.1
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2015 - Triwulan I-2019



C. PERKIRAAN INDEKS TENDENSI KONSUMEN TRIWULAN II-2019

Nilai ITK Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan II-2019 yang akan datang diperkirakan sebesar 122,99. Besaran indeks menunjukkan bahwa perkiraan kondisi ekonomi konsumen pada Triwulan II-2019 akan jauh lebih baik jika dibandingkan Triwulan saat ini. Perkiraan pendapatan rumah tangga meningkat cukup signifikan, dimana nilai indeksnya mencapai 134,58. Terdapat juga peningkatan pada komponen rencana pembelian barang tahan lama, yang ditunjukkan oleh nilai

indeks komponen sebesar 102,68. Perkiraan peningkatan pendapatan serta aktivitas pembelian barang tahan lama disebabkan adanya momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri yang jatuh pada Triwulan II-2019.

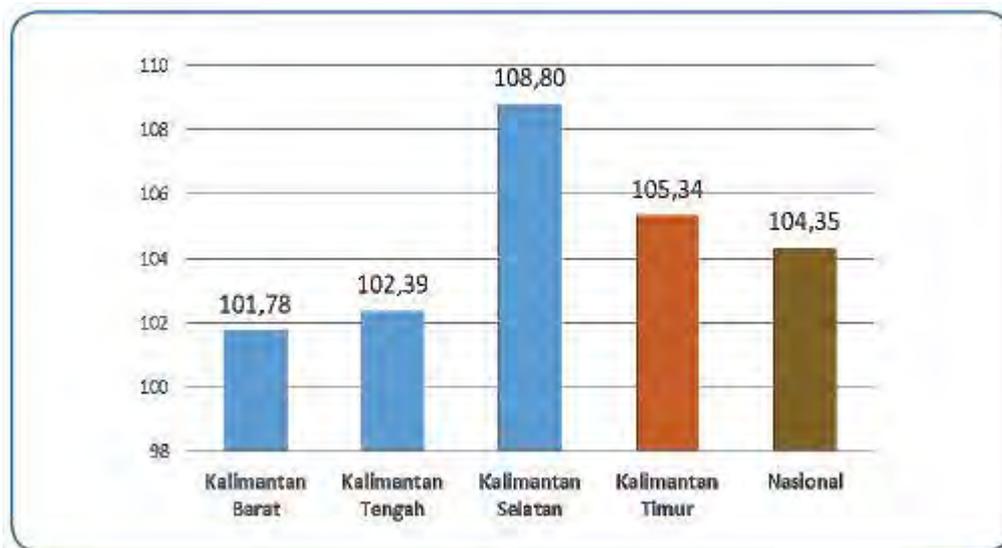
Tabel 3.6.3
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Kalimantan Timur
Triwulan II-2019 (April-Juni)

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw.II-2019
(1)	(2)
1. Perkiraan pendapatan rumah tangga mendatang	134,58
2. Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, meubelair, peralatan rumah tangga, perhiasan, kendaraan bermotor, rumah, tanah), rekreasi, dan pesta/hajatan	102,68
Indeks Tendensi Konsumen	122,99

D. PERBANDINGAN REGIONAL

Kondisi ekonomi empat provinsi di wilayah Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan nilai indeks di empat provinsi tersebut di atas 100. Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur memiliki nilai ITK di atas nilai ITK Nasional yang besarnya mencapai 104,35. Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki nilai ITK di bawah nilai ITK Nasional. Optimisme konsumen di Kalimantan Selatan menjadi yang paling tinggi di antara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, sementara itu posisi optimisme konsumen yang paling rendah adalah Kalimantan Barat.

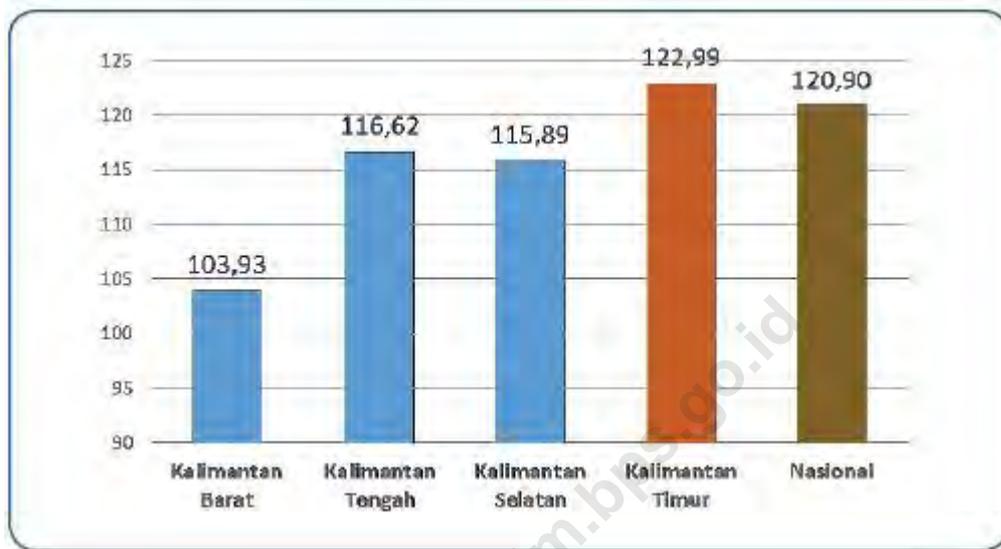
Gambar 3.6.2
Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2019 Menurut Provinsi di Kalimantan



Pada Triwulan II-2019 yang akan datang diperkirakan kondisi ekonomi konsumen akan meningkat jika dibandingkan dengan kondisi triwulan ini. Hal ini ditunjukkan dengan besaran indeks secara Nasional yang cukup tinggi di atas 100 yaitu sebesar 120,90. Kondisi ekonomi konsumen pada keempat provinsi di Kalimantan juga diperkirakan meningkat dengan indeks berada di atas 100.

Gambar 3.6.3

Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II-2019 Menurut Provinsi di Kalimantan



3.7. PERTUMBUHAN EKONOMI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I-2019

A. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

A.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2019 Terhadap Triwulan I-2018 (y-on-y)

Perekonomian Kalimantan Timur pada awal tahun 2019 ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,36 persen jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Pertumbuhan triwulan ini lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2018 yang tumbuh sebesar 1,77 persen.

Secara year on year (y-on-y) pertumbuhan Triwulan I-2019 ini dipicu oleh pertumbuhan pada hampir seluruh lapangan usaha dibandingkan kondisi Triwulan I-2018 lalu kecuali Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan. Pada Triwulan I-2019 secara y-on-y, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 16,14 persen; diikuti Lapangan Usaha Jasa lainnya yang tumbuh sebesar 9,20 persen; dan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,37 persen. Sedangkan lapangan Usaha Industri Pengolahan masih mengalami kontraksi sebesar 1,12 persen.

Gambar 3.7.1.

Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha PDRB Kalimantan Timur Triwulan I-2019 (y-on-y) (Persen)



Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti, masih relatif sama dengan struktur pada triwulan-triwulan sebelumnya. Pada Triwulan I-2019, masih didominasi lima lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 46,25 persen; Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 17,74 persen; Lapangan Usaha Konstruksi dengan peranan sebesar 9,07 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 7,83 persen; dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 5,67 persen.

Sementara itu, jika diamati sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2019 secara y-on-y, sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang memiliki andil sebesar 3,38 persen; diikuti Lapangan usaha

Konstruksi dengan andil sebesar 1,09 persen; Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan andil sebesar 0,43 persen; Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 0,29 persen; lalu Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi serta Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi masing-masing memberi andil sebesar 0,10 persen; dan 0,36 persen merupakan andil dari sembilan lapangan usaha yang lainnya.

Gambar 3.7.2
Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)



Sedangkan Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Jasa Perusahaan masih memberi andil negatif terhadap pertumbuhan perekonomian Kalimantan Timur yang akhirnya memperlambat kecepatan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara y-on-y pada Triwulan I-2019.

A.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (q-to-q)

Secara quarter to quarter (q-to-q), kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2019 tumbuh sebesar 0,90 persen bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang berarti mengalami perlambatan dibandingkan Triwulan IV-2018 yang tumbuh sebesar 4,16 persen. Hal tersebut selain disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan di beberapa lapangan usaha, juga terdapat beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pada triwulan ini seperti Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sebesar 2,89 persen; Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi sebesar 0,79 persen; Lapangan Usaha Konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 0,67 persen; serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen.

Selain keempat lapangan usaha tersebut, lapangan usaha lainnya masih tumbuh positif pada Triwulan I-2019 ini seperti Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang mencapai pertumbuhan tertinggi secara q-to-q sebesar 2,93 persen; Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 2,67 persen; dan disusul oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 2,52 persen.

Sumber Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan I-2019 secara q-to-q yang tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan andil sebesar 0,74 persen, disusul oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan andil sebesar 0,17 persen, dan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil sebesar 0,12 persen.

Gambar 3.7.3
Perkembangan Tiga Lapangan Usaha dengan Laju Pertumbuhan Tertinggi
pada Triwulan I-2019 (q-to-q) (Persen)

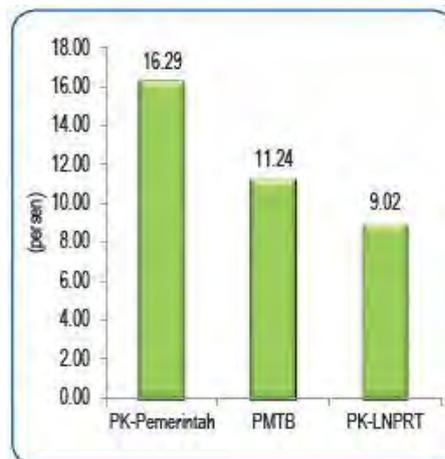


B. PDRB MENURUT PENGELUARAN

B.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2019 Terhadap Triwulan I-2018 (y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan I-2019 secara y-on-y terjadi hampir pada seluruh komponen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 16,29 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11,24 persen. Komponen Ekspor Luar Negeri masih mampu tumbuh 0,61 persen sedangkan komponen Net Ekspor Antar Daerah mengalami kontraksi sebesar (8,35) persen.

Gambar 3.7.4
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran
Triwulan I-2019 (y-on-y) (Persen)



Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I-2019 (y-on-y), komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi mencapai 2,71 persen, yang kemudian diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masing-masing secara berturut-turut sebesar 0,56 persen dan 0,31 persen.

Gambar 3.7.5
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (y-on-y) (Persen)

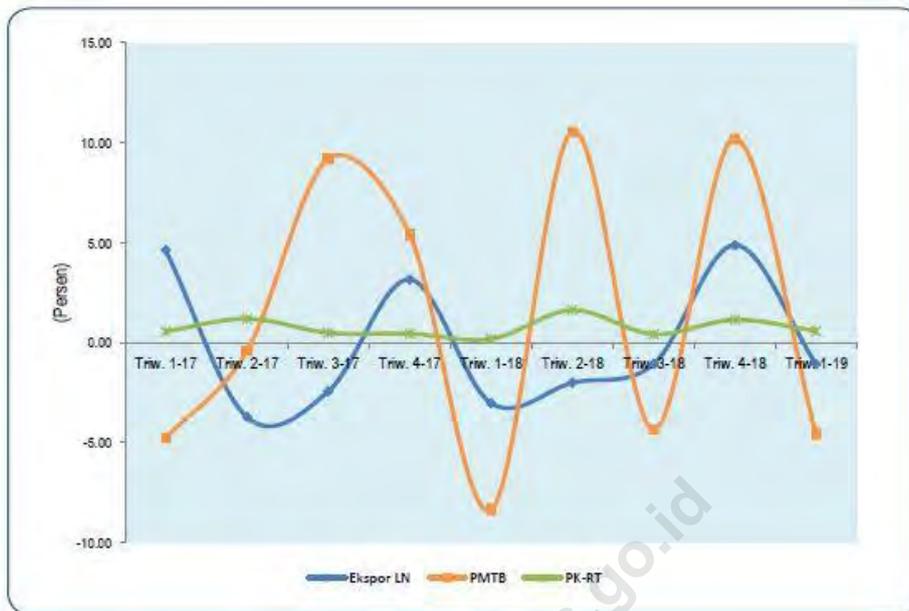


B.2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (q-to-q)

Perekonomian Kalimantan Timur pada triwulan I-2019 tumbuh sebesar 0,90 persen. Pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 4,16 persen (q-to-q). Perlambatan pertumbuhan ini antara lain disebabkan penurunan pada beberapa komponen utama seperti komponen Ekspor Luar Negeri (1,07) persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,57) persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (50,25) persen.

Struktur PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 35,97 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 27,60 persen, dan komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 26,46 persen.

Gambar 3.7.6
Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran (q-to-q)
Triwulan I-2017 - Triwulan I-2019



C. PDRB PULAU KALIMANTAN

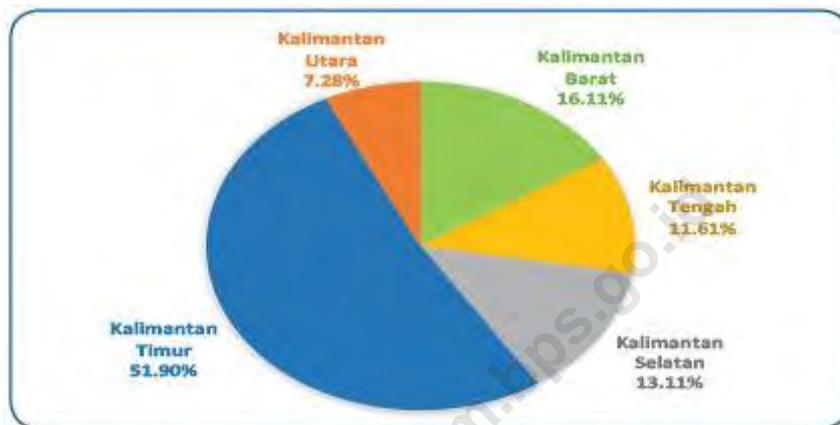
Dilihat kinerja ekonomi di Pulau Kalimantan secara umum pada Triwulan I- 2019 tumbuh sebesar 5,33 persen dibandingkan triwulan I-2018 (y-on-y). Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q), kinerja ekonomi Pulau Kalimantan pada Triwulan I-2019 mengalami kontraksi sebesar 0,18 persen. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan mengalami kontraksi sebesar 5,57 persen, Kalimantan Utara mengalami kontraksi sebesar 0,56 persen, dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat mengalami kontraksi sebesar 0,26 persen (q-to-q).

Gambar 3.7.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Kalimantan
Triwulan I-2019 secara q-to-q dan y-on y (Persen)



Diamati secara spasial, pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2019 secara y-on-y menempatkan Kalimantan Utara dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 7,13 persen, diikuti Kalimantan Tengah sebesar 6,03 persen, Kalimantan Timur sebesar 5,36 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen, dan Kalimantan Selatan sebesar 4,08 persen. Namun jika dilihat struktur perekonomian Pulau Kalimantan pada Triwulan I-2019, masih didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 51,90 persen, diikuti Kalimantan Barat sebesar 16,11 persen, Kalimantan Selatan sebesar 13,11 persen, Kalimantan Tengah sebesar 11,61 persen, dan Kalimantan Utara sebesar 7,28 persen.

Gambar 3.7.8
Struktur Ekonomi Pulau Kalimantan Triwulan I-2019



3.8. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI PENGOLAHAN TRIWULAN I 2019

A. INDUSTRI PENGOLAHAN BESAR DAN SEDANG

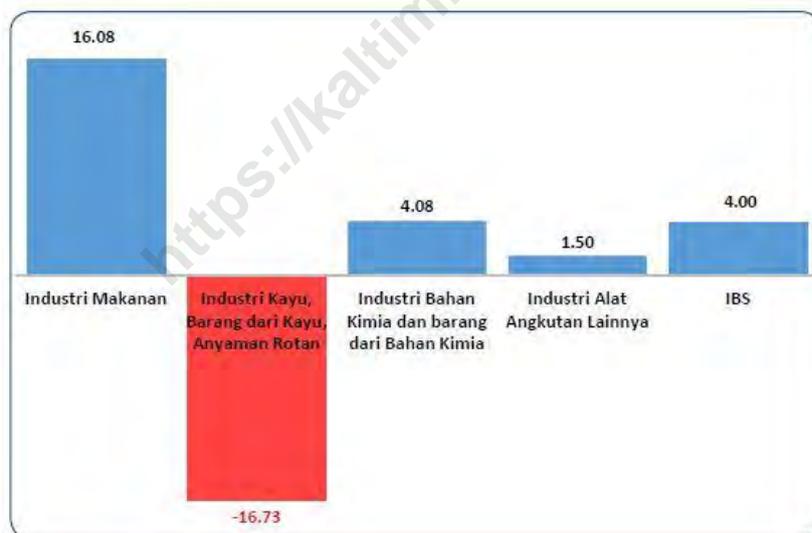
A.1. Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang Triwulanan (y-on-y)

Pertumbuhan industri pengolahan besar dan sedang pada Triwulan I-2019 meningkat sebesar 4,00 persen terhadap Triwulan I-2018. Kinerja industri pengolahan menurut golongan industri y-on-y, adalah:

- Industri Makanan, naik 16,08 persen
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia, naik 4,08 persen
- Industri Alat Angkutan Lainnya, naik 1,50 persen
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, turun 16,73 persen

Gambar 3.8.1. memperlihatkan pertumbuhan produksi industri pengolahan besar dan sedang Triwulan I-2019 (y-on-y) menurut KBLI 2-digit.

Gambar 3.8.1
Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang
Triwulan I-2019 (y-on-y)

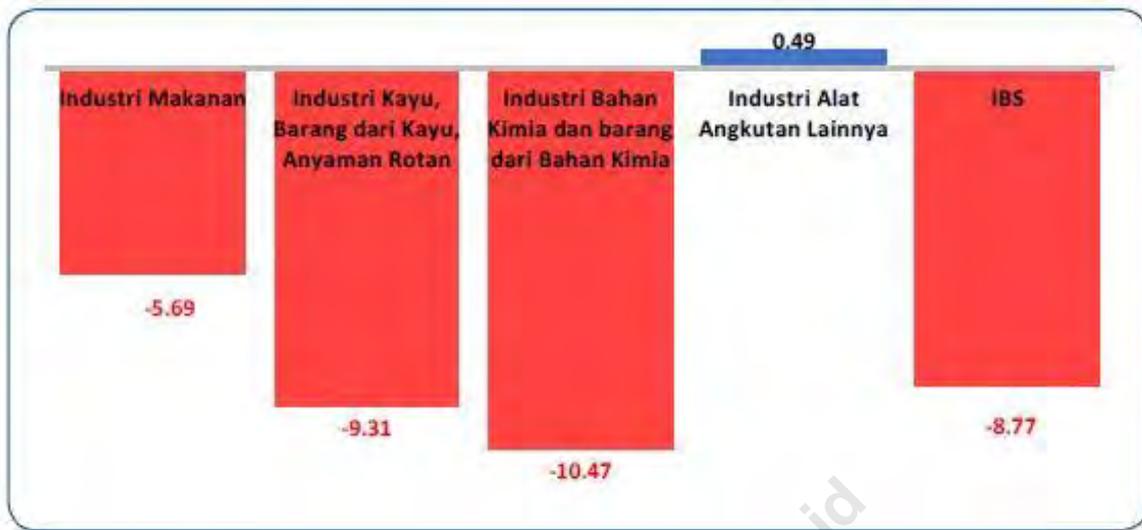


A.2. Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang Triwulanan (q-to-q)

Pertumbuhan produksi industri pengolahan besar dan sedang pada Triwulan I-2019 menurun sebesar 8,77 persen terhadap Triwulan IV/2018. Perkembangan kinerja industri pengolahan besar dan sedang menurut golongan adalah:

- Industri Alat Angkutan Lainnya, naik 0,49 persen
- Industri Makanan, turun 5,69 persen
- Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, turun 9,31 persen
- Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia, turun 10,47 persen

Gambar 3.8.2
Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang
Triwulan I-2019 (q-to-q)



B. INDUSTRI PENGOLAHAN MIKRO DAN KECIL

B.1. Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Mikro dan Kecil Triwulanan (y-on-y)

Pertumbuhan produksi industri pengolahan mikro dan kecil pada Triwulan I-2019 mengalami kenaikan sebesar 15,91 persen (y-on-y) terhadap Triwulan I-2018.

- Industri pengolahan mikro dan kecil yang mengalami kenaikan tertinggi adalah:
- Industri pengolahan lainnya naik 57,80 persen
- Industri kendaraan bermotor naik 39,31 persen
- Industri percetakan dan reproduksi media rekaman, naik 27,83 persen
- Industri kayu, barang dari kayu, anyaman, naik 24,10 persen
- Industri furnitur, naik 22,33 persen
- Industri farmasi, obat, dan obat tradisional, naik 12,83 persen
- Industri minuman, naik 10,63 persen
- Industri karet, barang dari karet dan plastik, naik 7,65 persen
- Industri tekstil, naik 1,93 persen

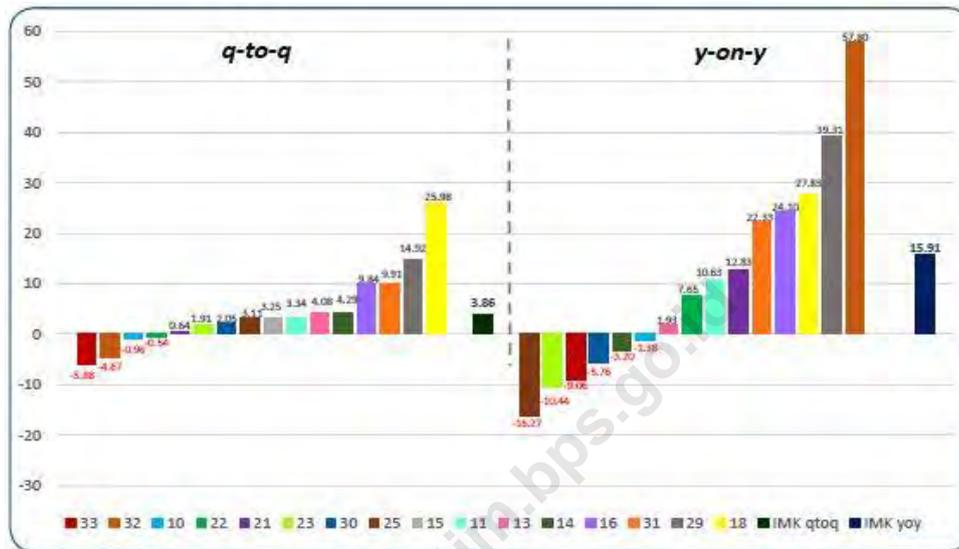
Sedangkan industri pengolahan mikro dan kecil yang mengalami penurunan adalah:

- Industri makanan, turun 1,38 persen
- Industri pakaian jadi, turun 3,20 persen
- Industri alat angkutan lainnya, turun 5,76 persen
- Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, turun 9,06
- Industri barang galian bukan logam, turun 10,44 persen
- Industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya, turun 16,27 persen

2. Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Mikro dan Kecil Triwulanan (*q-to-q*)

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV/2018, perkembangan kegiatan industri mikro dan kecil pada Triwulan I/2019 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan produksi sebesar 3,86 persen.

Gambar 3.8.3
Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Mikro dan Kecil
Provinsi Kalimantan Timur, Triwulan I/2019



Beberapa industri pengolahan mikro dan kecil yang mengalami kenaikan tertinggi pada Triwulan I/2019 terhadap Triwulan IV/2018 adalah:

- Industri percetakan dan reproduksi media rekaman, naik 25,98 persen
- Industri kendaraan bermotor, naik 14,92 persen
- Industri furnitur, naik 9,91 persen
- Industri kayu, barang dari kayu, anyaman, naik 9,84 persen
- Industri pakaian jadi, naik 4,29 persen
- Industri tekstil, naik 4,08 persen
- Industri minuman, naik 3,34 persen
- Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, naik 3,25 persen
- Industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, naik 3,11 persen
- Industri alat angkut lainnya, naik 2,05 persen
- Industri barang galian bukan logam, naik 1,91 persen
- Industri farmasi, produk obat kimia dan tradisional, naik 0,64 persen

Sedangkan industri pengolahan mikro dan kecil yang mengalami penurunan adalah:

- Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, turun 5,88 persen
- Industri pengolahan lainnya, turun 4,67 persen
- Industri makanan, turun 0,96 persen
- Industri karet, barang dari karet dan plastik, turun 0,54 persen

3.9. KEADAAN KETENAGAKERJAAN KALIMANTAN TIMUR AGUSTUS 2018

A. ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA DAN PENGANGGURAN

Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Timur pada Februari 2019 mencapai 1.899.900 orang, bertambah sebanyak 88.640 orang dibanding angkatan kerja Februari 2018 (1.815.260 orang). Penduduk yang bekerja pada Februari 2019 mencapai 1.773.371 orang, bertambah sebanyak 83.278 orang dibanding keadaan pada Februari 2018 (1.690.093 orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019 mencapai 6,66 persen atau sebanyak 126.529 orang, mengalami penurunan dibanding TPT Februari 2018 sebesar 6,90 persen (125.167 orang).

B. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

Lapangan pekerjaan atau usaha utama terdiri atas 17 kategori yang meliputi kategori A-Pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori B-Pertambangan dan penggalian; kategori C-Industri pengolahan; kategori D-Pengadaan listrik dan gas; kategori E-Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; kategori F-konstruksi, kategori G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; hingga kategori R,S,TU yaitu kategori Jasa Lainnya. Jika dilihat menurut kategorinya, maka yang banyak menyerap tenaga kerja adalah pada kategori A-pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 20,52 persen, berikutnya adalah kategori G-Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,80 persen dan kegiatan di kategori jasa-jasa yaitu P,Q,R,S,T dan U sebesar 11,03 persen. Sektor pertambangan dan penggalian yang mendominasi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur menyerap tenaga kerja sebesar 7,94 persen.

Berdasarkan 17 kategori lapangan usaha tersebut, dua kategori masih mendominasi lapangan pekerjaan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu ketegori A-pertanian, kehutanan, perikanan dan kategori lapangan pekerjaan G-perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

C. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Dari sebanyak 1,77 juta orang yang bekerja pada Februari 2019, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan yaitu sebanyak 885,6 ribu orang (49,94 persen), diikuti berusaha sendiri sebanyak 269,2 ribu orang (15,18 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 239,7 ribu orang (13,52 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 216,3 ribu (12,20 persen), dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 93,4 ribu orang (5,27 persen). Jumlah pekerja paling sedikit terdapat pada pekerja bebas di pertanian sebanyak 29,9 ribu orang (1,69 persen).

Terjadi penurunan pada persentase status bekerja sebagai buruh/karyawan, berusaha sendiri dan pekerja bebas non pertanian, akibat terjadinya peralihan status pekerjaan ke Berusaha

dibantu buruh tidak tetap maupun Berusaha dibantu buruh tetap dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar).

D. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Pada Februari 2019, sebanyak 442,7 ribu orang (24,96 persen) bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam atau lebih per minggu (full employment) mencapai 1,33 juta orang (75,04 persen), termasuk pekerja yang sementara tidak bekerja.

E. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT PENDIDIKAN

Pada Februari 2019, penduduk yang bekerja dengan jenjang pendidikan SD ke bawah merupakan proporsi jenjang pendidikan terbesar penduduk yang bekerja dengan jumlah sebanyak 554,9 ribu orang atau sebesar 31,29 persen. Terbesar kedua adalah penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMA Umum sebanyak 402,3 ribu orang (22,69 persen), disusul penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMP sebanyak 301,1 ribu orang (16,98 persen), dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan SMA Kejuruan yang mencapai 293,8 ribu orang (16,57 persen). Sedangkan penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 221,3 ribu orang atau hanya sebesar 12,48 persen.

F. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN

Jumlah pengangguran pada Februari 2019 mencapai 126.529 orang dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 1,89 juta orang atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 6,66 persen dari total angkatan kerja. TPT untuk pendidikan SMP ke bawah sebesar 6,40 persen (58.515 orang) meningkat dibandingkan TPT pada tahun 2018 yang hanya sebesar 4,60 persen (36.089 orang). TPT untuk pendidikan SMA/SMK sebesar 7,38 persen (55.446 orang), atau mengalami penurunan jika dibandingkan nilai TPT tahun sebelumnya yang sebesar 10,14 persen (73.594 orang), sedangkan TPT untuk Pendidikan Tinggi sebesar 5,37 persen (12.568 orang), sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan tingkat TPT tahun 2018 yang sebesar 5,09 persen (15.484 orang).

3.10. TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN TIMUR SEPTEMBER 2018

A. PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI KALIMANTAN TIMUR, MARET 2018 – SEPTEMBER 2018

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada September 2018 sebesar 222,39 ribu (6,06 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2018 sebesar 218,90 ribu (6,03 persen), berarti jumlah penduduk miskin secara absolut sebanyak 3,49 ribu orang atau secara persentase naik sebesar 0,03 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sedangkan di perdesaan mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara persentase. Selama periode Maret 2018 – September 2018 penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 7,89 ribu orang atau secara persentase naik 0,22 persen dari 100,45 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 108,34 ribu orang pada September 2018. Penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebanyak 4,39 ribu orang atau secara persentase turun sebesar 0,19 persen poin dari 118,44 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 114,05 ribu orang pada September 2018.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan September 2018 dan Maret 2018 masing-masing sebesar 9,65 persen dan 9,84 persen. Sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,36 persen pada bulan September 2018 dan 4,14 persen pada bulan Maret 2018.

B. PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN MARET 2018 – SEPTEMBER 2018

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2018 – September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,09 persen, yaitu dari Rp.574.704,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 598.200,- per kapita per bulan pada September 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan September 2018, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,13 persen.

Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan, pada bulan September 2018 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 601.619,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 589.588,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan.

C. KOMODITI PENYUMBANG TERBESAR GARIS KEMISKINAN

Komoditi makanan yang mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kalimantan Timur pada bulan September 2018 antara daerah perkotaan dan pedesaan terdapat kemiripan pola. Dari lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan makanan di perkotaan dan di pedesaan, empat diantaranya sama yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telur ayam ras.

Dari lima komoditi terbesar penyumbang garis kemiskinan non makanan di perkotaan dan di pedesaan, empat diantaranya terdapat persamaan yaitu perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan.

D. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk berkaitan dengan miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Semakin jauh dari angka nol, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) semakin melebar.

Pada periode Maret 2018 – September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,846 pada keadaan Maret 2018 menjadi 0,764 pada keadaan September 2018. Indeks Keparahannya Kemiskinan turun dari 0,197 menjadi 0,148 pada periode yang sama.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Pada bulan September 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,537 sementara di daerah pedesaan mencapai 1,242. Nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,096 sementara di daerah pedesaan mencapai 0,258. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

E. PERKEMBANGAN GINI RATIO DAN DISTRIBUSI PENGELUARAN MARET 2018 – SEPTEMBER 2018

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kalimantan Timur pada September 2018 tercatat sebesar 0,342. Angka ini sama besar jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,347 turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,350. Gini Ratio di daerah pedesaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,297 naik dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,287.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran

ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Semakin tinggi persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Kalimantan Timur sebesar 19,69 persen, turun 0,17 poin dibanding angka Maret 2018 (19,86 persen). Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,37 persen sedangkan di daerah perdesaan tercatat sebesar 21,57 persen, yang berarti tingkat ketimpangan di perkotaan dan perdesaan masuk kategori rendah.

<https://kaltim.bps.go.id>

3.11. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2018

A. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KALIMANTAN TIMUR 2010 - 2018

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Perluasan pilihan ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan manusia dan pemanfaatan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati kehidupan serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kebudayaan, sosial dan politik.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990, dengan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010 (IPM Metode Baru). BPS mengadopsi metodologi baru penghitungan IPM ini sejak tahun 2014 dan telah dilakukan backcasting sampai ke angka IPM tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Dengan paritas daya beli dihitung menurut harga-harga yang berlaku di Jakarta Selatan, sehingga nilai Pengeluaran per kapita disesuaikan ini memiliki keterbandingan dengan daerah lainnya.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Gambar 3.11.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur, 2010-2018



Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2018. IPM Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari 71,31 pada tahun 2010 menjadi 75,83 pada tahun 2018. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Kalimantan Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,77 persen per tahun. Pada periode 2017-2018, IPM Provinsi Kalimantan Timur tumbuh 0,95 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2016-2017 yang tumbuh sebesar 0,71 persen. Selama periode 2010 hingga 2018, IPM Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan positif, namun status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur masih belum mengalami lompatan status. Saat ini pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur berstatus “tinggi” bersama dengan 14 provinsi lainnya di Indonesia.

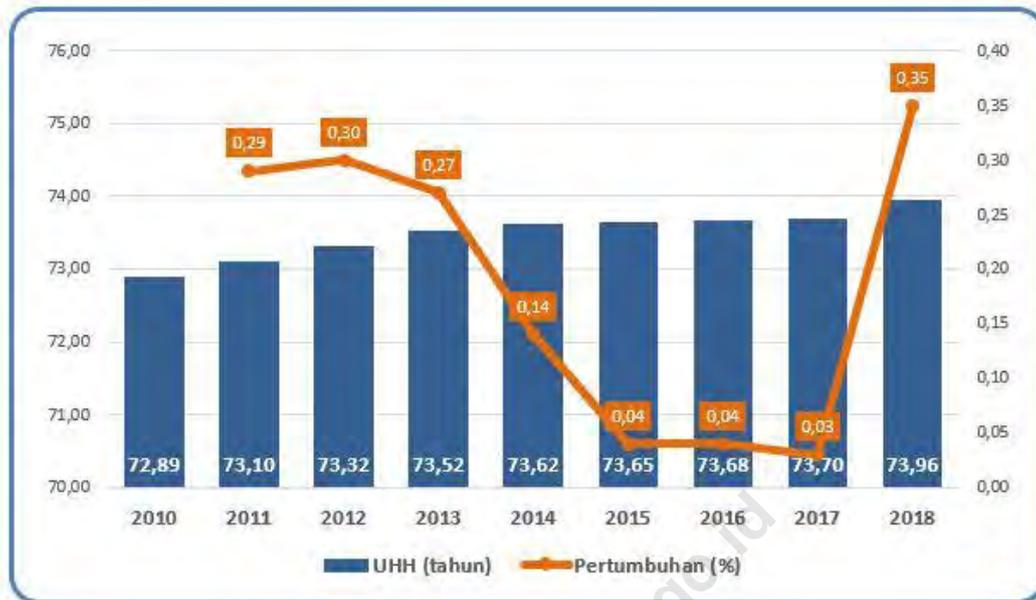
B. PENCAPAIAN KAPABILITAS MANUSIA

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun (Tabel 3.11.1).

B.1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,07 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 72,89 tahun, dan pada tahun 2018 telah mencapai 73,96 tahun. Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur sebesar 73,96 menunjukkan bahwa setiap penduduk Kalimantan Timur yang lahir pada tahun 2018 memiliki peluang hidup hingga usia 73 tahun 11 bulan.

Gambar 3.11.2
Perkembangan Komponen Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)
Kalimantan Timur, 2010-2018



B.2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Terdapat keterkaitan antara kedua indikator ini, yaitu peningkatan angka Harapan Lama Sekolah pada jangka panjang akan menaikkan angka Rata-rata Lama Sekolah.

Selama periode 2010 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,78 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,67 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur tumbuh 1,29 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik. Hingga tahun 2018, secara rata-rata penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

Gambar 3.11.3

Perkembangan Komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Kalimantan Timur, 2010-2018



Gambar 3.11.4

Perkembangan Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kalimantan Timur, 2010-2018



B.3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, yang direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (harga konstan 2012). Pada tahun 2018 ini, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai 11,92 juta rupiah per tahun, atau bertambah 1,13 juta rupiah dibandingkan tahun 2010. Dengan demikian, Pengeluaran per Kapita Disesuaikan tersebut selama periode delapan tahun terakhir ini rata-rata tumbuh 1,25 persen per tahun.

Gambar 3.11.5

Perkembangan Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kalimantan Timur, 2010-2018



C. PENCAPAIAN PEMBANGUNA MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA

Pada tahun 2018, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 66,67 (Kabupaten Mahakam Ulu) hingga 79,93 (Kota Samarinda).

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Usia Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 71,05 tahun (Kabupaten Penajam Paser Utara) hingga 74,18 tahun (Kota Balikpapan). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 12,48 tahun (Kabupaten Mahakam Ulu) hingga 14,66 tahun (Kota Samarinda), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,69 tahun (Kabupaten Mahakam Ulu) hingga 10,72 tahun (Kota Bontang). Sedangkan, pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 7,65 juta rupiah per tahun (Kabupaten Mahakam Ulu) hingga 16,70 juta rupiah per tahun (Kota Bontang).

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2018 juga terlihat dari kecepatan perubahan nilai IPM yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, capaian pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi bahkan merupakan yang tertinggi untuk kawasan timur Indonesia. Hingga saat ini, kabupaten/kota di Kalimantan Timur berstatus pembangunan manusia “tinggi”, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu yang masih berstatus pembangunan manusia “sedang”.

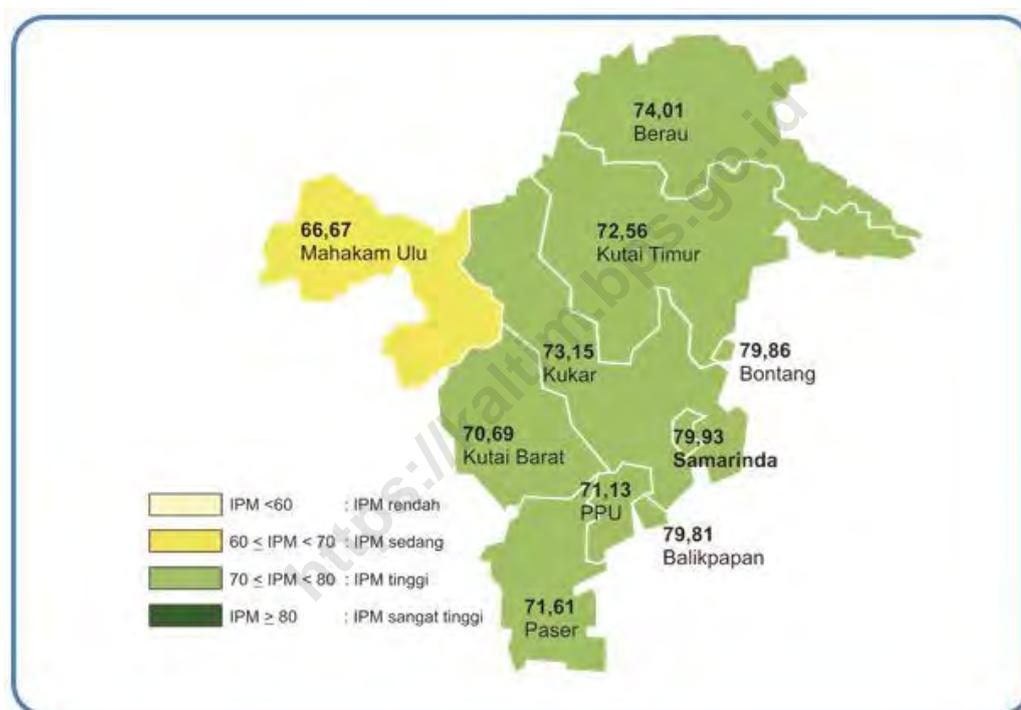
Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2017 hingga 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kota Balikpapan (1,01 persen), Kabupaten Kutai Timur (0,90 persen), dan Kabupaten Mahakam Ulu (0,88 persen).

Kemajuan pembangunan manusia di Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Timur didorong oleh peningkatan pada dimensi pendidikan serta perbaikan standar hidup layak, sementara di

Kabupaten Mahakam Ulu lebih dikarenakan dimensi ekonomi berupa peningkatan pada standar hidup layak masyarakat di Mahakam Ulu. Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kota Bontang (0,49 persen) tercatat paling lambat di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2017-2018.

Pada tahun 2018, terjadi perubahan ranking IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. IPM Kota Samarinda menempati peringkat pertama, melampaui IPM Kota Bontang yang pada tahun sebelumnya berada di peringkat pertama. Perubahan ini disebabkan kecepatan peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kota Samarinda yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan di Kota Bontang, walaupun Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Samarinda masih sedikit lebih rendah dibandingkan Kota Bontang.

Gambar 3.11.6
Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2018



D. PERBANDINGAN REGIONAL

Dibandingkan dengan empat provinsi lainnya di Kalimantan, capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi. Pada tahun 2018, kecepatan pertumbuhannya mencapai angka 0,95 persen dan berada di atas rata-rata Nasional (0,82 persen). Besaran angka dan peringkat IPM Kalimantan Timur berada pada posisi ketiga di Nasional, setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

IV. LAMPIRAN

Tabel 3.9.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur
Menurut Daerah, Maret 2018 – September 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Maret 2018	100,45	118,44	218,90	4,14	9,84	6,03
September 2018	108,34	114,05	222,39	4,36	9,65	6,06

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret dan September 2018

Tabel 3.6.2
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Maret 2018 – September 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
<u>Perkotaan</u>					
Maret 2018	394 601	181 664	576 265	100,45	4,14
September 2018	411 445	190 174	601 619	108,34	4,36
<u>Perdesaan</u>					
Maret 2018	424 731	145 280	570 012	118,44	9,84
September 2018	435 064	154 525	589 588	114,05	9,65
<u>Kalimantan Timur</u>					
Maret 2018	405 108	169 596	574 704	218,90	6,03
September 2018	419 550	178 650	598 200	222,39	6,06

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret dan September 2018.

Tabel 3.6.3
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan
Menurut Daerah, September 2018

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	15,80	Beras	17,87
2	Rokok kretek filter	9,07	Rokok kretek filter	17,54
3	Daging sapi	5,48	Daging ayam ras	4,21
4	Telur ayam ras	4,81	Telur ayam ras	3,71
5	Daging ayam ras	2,81	Tongkol/tuna/cakalang	3,23
6	Mie instan	2,50	Mie instan	3,11
7	Tongkol/tuna/cakalang	2,38	Gula pasir	2,87
8	Kue basah	2,14	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,67
9	Gula pasir	2,05	Bawang merah	1,55
10	Susu bubuk	2,04	Daging sapi	1,52
11	Tahu	1,61	Tempe	1,49
12	Tempe	1,60	Roti	1,21
13	Bandeng	1,46	Minyak kelapa	1,15
14	Bawang merah	1,34	Tahu	1,10
15	Roti	1,34	Bandeng	1,00

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2018

Tabel 3.6.4
Persentase Komoditi Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan
Menurut Daerah, September 2018

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Perumahan	10,90	Perumahan	12,11
2	Bensin	4,36	Bensin	3,12
3	Listrik	3,96	Listrik	2,83
4	Pendidikan	2,00	Pendidikan	1,07
5	Air	1,87	Perlengkapan mandi	1,05
6	Perlengkapan mandi	1,16	Pakaian jadi anak-anak	0,82
7	Kesehatan	1,08	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,65
8	Perawatan kulit, muka, kuku, tambut	0,77	Sabun cuci	0,63
9	Pakaian jadi anak-anak	0,68	Kesehatan	0,52
10	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,63	Pakaian jadi laki-laki dewasa	0,48
11	Angkutan	0,60	Pajak kendaraan bermotor	0,45
12	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,54	Perawatan kulit, muka, kuku, tambut	0,36
13	Pajak kendaraan bermotor	0,52	Barang kecantikan	0,35
14	Sabun cuci	0,44	Air	0,35
15	Bahan pemeliharaan pakaian	0,39	Obat nyamuk, korek api, baterai, aki, dsb	0,24

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2018

Tabel 3.6.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) di Kalimantan Timur
Menurut Daerah, Maret 2018 – September 2018

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
<i>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)</i>			
Maret 2018	0,656	1,229	0,846
September 2018	0,537	1,242	0,764
<i>Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)</i>			
Maret 2018	0,161	0,270	0,197
September 2018	0,096	0,258	0,148

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret dan September 2018

Tabel 3.6.6
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk di Kalimantan Timur
Menurut Daerah, Maret 2018 – September 2018

Ukuran Ketimpangan	Maret 2018			September 2018		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
Gini Ratio	0,350	0,287	0,342	0,347	0,297	0,342
Bank Dunia 40 % Terbawah	19,39	22,45	19,86	19,37	21,57	19,69

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret dan September 2018

Tabel 3.11.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur
Menurut Komponen, 2010-2018

Komponen (1)	Satuan (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012 (5)	2013 (6)	2014 (7)	2015 (8)	2016 (9)	2017 (10)	2018 (11)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	72,89	73,10	73,32	73,52	73,62	73,65	73,68	73,70	73,96
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,87	12,06	12,46	12,85	13,17	13,18	13,35	13,49	13,67
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,56	8,79	8,83	8,87	9,04	9,15	9,24	9,36	9,48
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribuan Rupiah	10 790	10 927	10 944	10 981	11 019	11 229	11 355	11 612	11 917
IPM		71,31	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17	74,59	75,12	75,83
Pertumbuhan IPM (Persen)			1,01	0,82	0,81	0,83	0,48	0,57	0,71	0,95

Tabel 3.11.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2018

Kabupaten/Kota (1)	UHH (tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)		Capaian IPM		Pertumbuhan (%) (12)
	2017 (2)	2018 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2017 (6)	2018 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2017 (10)	2018 (11)	
Paser	72,05	72,28	12,98	12,99	8,20	8,22	10 280	10 605	71,16	71,61	0,63
Kutai Barat	72,37	72,57	12,82	12,88	8,06	8,07	9 532	9 849	70,18	70,69	0,73
Kutai Kartanegara	71,68	71,93	13,56	13,57	8,83	8,84	10 692	10 959	72,75	73,15	0,55
Kutai Timur	72,51	72,76	12,48	12,65	9,06	9,08	10 273	10 614	71,91	72,56	0,90
Berau	71,44	71,68	13,29	13,30	8,96	8,98	11 843	12 207	73,56	74,01	0,61
Penajam Paser Utara	70,82	71,05	12,53	12,54	7,95	8,03	11 126	11 492	70,59	71,13	0,76
Mahakam Ulu	71,25	71,56	12,47	12,48	7,68	7,69	7 364	7 653	66,09	66,67	0,88
Kota Balikpapan	73,97	74,18	13,75	14,12	10,55	10,65	14 254	14 557	79,01	79,81	1,01

Kota Samarinda	73,71	73,93	14,64	14,66	10,34	10,46	14 175	14 466	79,46	79,93	0,59
Kota Bontang	73,72	73,94	12,88	12,89	10,70	10,72	16 271	16 698	79,47	79,86	0,49
KALIMANTAN TIMUR	73,70	73,96	13,49	13,67	9,36	9,48	11 612	11 917	75,12	75,83	0,95

Tabel 3.11.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Kalimantan Menurut Komponen, 2018

Provinsi	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	IPM		
					Nilai	Pertum- buhan (Persen)	Peringkat Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kalimantan Barat	70,18	12,55	7,12	8 860	66,98	1,09	30
Kalimantan Tengah	69,64	12,55	8,37	10 931	70,42	0,90	21
Kalimantan Selatan	68,23	12,50	8,00	12 062	70,17	0,75	22
Kalimantan Timur	73,96	13,67	9,48	11 917	75,83	0,95	3
Kalimantan Utara	72,50	12,82	8,87	8 943	70,56	1,03	20
Indonesia	71,20	12,91	8,17	11 059	71,39	0,82	-



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Kemakmuran No.04 Samarinda 75117

Telp. : (0541) 732793, 743372, Fax : (0541) 201121

Email : bps6400@bps.go.id, Homepage : <http://kaltim.bps.go.id>

ISBN 978-602-6263-90-2

